

GRI 1: Landasan 2021

TANGGAL EFEKTIF BERLAKU 1 JANUARI 2023

STANDAR UNIVERSAL

1

GRI 1: Landasan 2021

Standar Universal

Tanggal efektif berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Tanggung jawab

Standar ini dikeluarkan oleh [Global Sustainability Standards Board \(GSSB\)](#). Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke gssbsecretariat@globalreporting.org untuk dipertimbangkan GSSB.

Proses hukum

Standar ini dikembangkan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan persyaratan Protokol Proses Pembuktian GSSB. Dokumen ini dikembangkan dengan memanfaatkan keahlian beberapa pemangku kepentingan, dan dengan mempertimbangkan instrumen resmi antarpemerintah dan harapan luas organisasi terkait dengan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Kewajiban hukum

Dokumen yang disusun oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) untuk mempromosikan pelaporan keberlanjutan ini telah melalui proses konsultasi spesifik dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pelibatan perwakilan dari berbagai organisasi serta pengguna informasi laporan di seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI dan GSSB mendorong penggunaan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI) dan interpretasi-interpretasi terkait oleh semua organisasi, persiapan dan penerbitan laporan yang mengacu sepenuhnya atau sebagian pada Standar GRI serta Interpretasi terkait merupakan tanggung jawab penuh dari pihak yang menerbitkan laporan. Baik Dewan Direksi GRI, GSSB, ataupun Stichting Global Reporting Initiative (GRI) tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan Standar GRI dan Interpretasi terkait dalam persiapan laporan, atau penggunaan laporan berdasarkan Standar GRI dan Interpretasi terkait.

Pemberitahuan hak cipta dan merek dagang

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta dari Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Reproduksi dan distribusi dokumen ini sebagai sumber informasi dan/atau penggunaannya untuk menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan dapat dilaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini maupun kutipannya tidak boleh direproduksi, disimpan, diterjemahkan, atau dipindahkan ke dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya) untuk tujuan lain apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari GRI.

Global Reporting Initiative, GRI dan logonya, GSSB dan logonya, serta GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI) dan logonya adalah merek dagang dari Stichting Global Reporting Initiative.

Daftar isi

Pendahuluan	4
1. Tujuan dan sistem Standar GRI	4
2. Konsep utama	8
3. Pelaporan sesuai dengan Standar GRI	12
4. Prinsip pelaporan	21
5. Rekomendasi tambahan untuk pelaporan	26
Daftar Istilah	28
Daftar Pustaka	32
Lampiran 1. Indeks konten GRI yang sesuai	33
Lampiran 2. Indeks konten GRI dengan rujukan	39

Pendahuluan

GRI 1: Landasan 2021 memperkenalkan tujuan dan sistem Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI) serta menjelaskan konsep utama dari pelaporan keberlanjutan. Landasan Ini juga menentukan persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi organisasi untuk melaporkan sesuai dengan Standar GRI. *GRI 1* adalah Standar pertama yang sebaiknya dijadikan rujukan oleh organisasi untuk memahami cara menyusun laporan menggunakan Standar GRI.

GRI 1 disusun sebagai berikut:

- **Bagian 1** Memperkenalkan tujuan dan sistem Standar GRI.
- **Bagian 2** menjelaskan konsep utama yang digunakan di seluruh Standar GRI.
- **Bagian 3** menguraikan seluruh persyaratan pelaporan sesuai dengan Standar GRI.
- **Bagian 4** menguraikan seluruh prinsip pelaporan, yang sangat penting untuk memastikan kualitas informasi yang dilaporkan.
- **Bagian 5** menyajikan berbagai rekomendasi bagi organisasi untuk menyelaraskan pelaporan keberlanjutannya dengan jenis pelaporan lainnya dan meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutannya.
- Daftar **Lampiran** memberikan panduan tentang cara menyiapkan indeks konten GRI.
- Daftar **Istilah** berisi istilah-istilah yang didefinisikan dengan makna khusus ketika digunakan di Standar GRI. Istilah-istilah tersebut digarisbawahi di dalam teks Standar GRI dan terkait dengan definisinya.
- Daftar **Pustaka** mencantumkan instrumen resmi antarpemerintah yang digunakan untuk mengembangkan Standar ini.

1. Tujuan dan sistem Standar GRI

1.1 Tujuan Standar GRI

Melalui kegiatan dan hubungan bisnis mereka, organisasi dapat memiliki pengaruh terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, yang selanjutnya memberikan kontribusi positif atau negatif pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berarti 'pembangunan yang memenuhi berbagai kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka' [8]. Tujuan dari pelaporan keberlanjutan menggunakan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (Standar GRI) adalah untuk memastikan transparansi mengenai cara organisasi untuk berkontribusi atau berupaya untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Standar GRI memungkinkan suatu organisasi mengungkapkan secara publik dampak dari kegiatannya yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia serta cara organisasi untuk mengelola dampak tersebut. Hal ini meningkatkan transparansi tentang dampak organisasi dan meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Standar tersebut berisi pengungkapan yang memungkinkan organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya secara konsisten dan kredibel. Hal ini meningkatkan komparabilitas global dan kualitas informasi yang dilaporkan tentang dampak ini, yang mendukung pengguna informasi dalam membuat penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi tentang dampak dan kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Standar GRI berdasarkan pada ekspektasi tata cara bisnis yang bertanggung jawab yang ditetapkan dalam instrumen-instrumen resmi organisasi antarpemerintah internasional, seperti *Panduan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk Perusahaan Multinasional* [3] dan *Prinsip-Prinsip Penuntun tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* [5] (lihat Daftar Pustaka Standar GRI untuk daftar instrumen resmi yang digunakan dalam mengembangkan Standar GRI). Informasi yang dilaporkan menggunakan Standar GRI dapat membantu pengguna dalam menilai apakah suatu organisasi memenuhi ekspektasi yang ditetapkan dalam instrumen ini. Informasi yang dilaporkan menggunakan Standar GRI dapat membantu pengguna dalam menilai apakah suatu organisasi memenuhi ekspektasi yang ditetapkan dalam instrumen ini.

1.2 Pengguna

Setiap organisasi dapat menggunakan Standar GRI – terlepas dari ukuran, jenis, lokasi geografis, atau pengalaman pelaporan – untuk melaporkan informasi tentang dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia mereka.

Informasi yang dilaporkan dapat digunakan oleh organisasi dalam pengambilan keputusan, contohnya, ketika menetapkan tujuan dan sasaran, atau ketika menilai dan mengimplementasikan kebijakan dan praktik mereka.

Pemangku Kepentingan dan pengguna informasi yang lain dapat menggunakan Standar GRI untuk memahami apa yang diharapkan untuk dilaporkan oleh organisasi. Pemangku kepentingan juga dapat menggunakan informasi yang dilaporkan oleh organisasi untuk menilai bagaimana mereka terdampak atau bagaimana mereka dapat terdampak oleh kegiatan organisasi.

Investor, khususnya, dapat menggunakan informasi yang dilaporkan untuk menilai dampak organisasi dan cara organisasi mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam model dan strategi bisnisnya. Mereka juga dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi risiko finansial dan peluang yang terkait dengan dampak organisasi dan untuk menilai keberhasilan jangka panjangnya. Pengguna selain pemangku kepentingan organisasi, seperti akademisi dan analis, juga dapat menggunakan informasi yang dilaporkan untuk beberapa tujuan seperti penelitian atau pelaksanaan tolok ukur.

Istilah 'pengguna informasi' dalam Standar GRI berarti semua pihak pengguna informasi yang dilaporkan organisasi.

1.3 Sistem Standar GRI

Standar GRI disusun sebagai sistem standar yang saling berkaitan yang disusun menjadi tiga seri: Standar Universal GRI, Standar Sektor GRI, dan Standar Topik GRI (lihat [Gambar 1](#) dalam Standar ini). Standar Universal digunakan oleh semua organisasi saat menyusun laporan yang sesuai dengan Standar GRI. Organisasi menggunakan Standar Sektor sesuai dengan sektor tempat mereka beroperasi, dan Standar Topik sesuai dengan daftar topik material.

Standar Universal: GRI 1, GRI 2 dan GRI 3

Organisasi mengawali dengan mempelajari *GRI 1: Landasan 2021*. *GRI 1* memperkenalkan tujuan dan sistem Standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk pelaporan keberlanjutan. *GRI 1* juga menguraikan berbagai persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.

GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail organisasi lainnya, seperti kegiatan, tata kelola, dan kebijakan. Informasi ini memberikan wawasan mengenai profil dan skala organisasi serta memberikan konteks untuk memahami dampak organisasi.

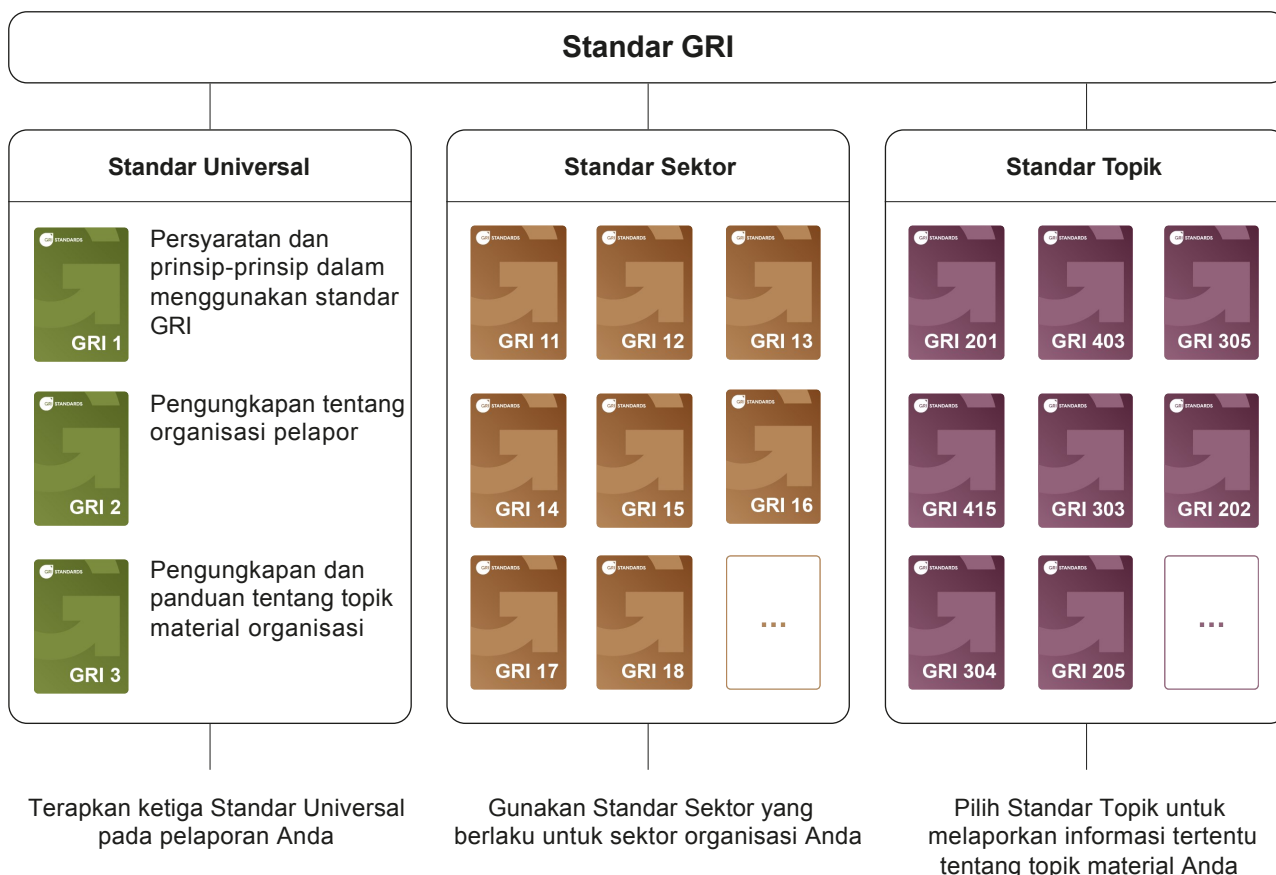
GRI 3: Topik Material 2021 menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material. *GRI 3* juga berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi tentang proses penentuan topik material, daftar topik material, dan cara mengelola setiap topik.

Standar Sektor

Sektor menyediakan informasi bagi organisasi mengenai mana yang berpotensi menjadi topik material mereka. Organisasi menggunakan Standar Sektor yang berlaku untuk sektornya saat menentukan topik materialnya, dan saat menentukan informasi apa yang akan dilaporkan untuk topik material.

Standar Topik

Standar Topik berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya sehubungan dengan topik tertentu. Standar Topik mencakup berbagai macam topik. Organisasi menggunakan Standar Topik sesuai dengan daftar topik material yang telah mereka tentukan menggunakan *GRI 3*.

Gambar 1. Standar GRI: Standar Universal, Sektor, dan Topik

1.4 Menggunakan Standar GRI

Semua pengungkapan dalam Standar GRI berisi persyaratan. Persyaratan berisi seluruh informasi yang harus dilaporkan oleh organisasi atau menyediakan petunjuk yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk membuat laporan sesuai dengan Standar GRI.

Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan yang alasan tidak mencantumkannya diizinkan (contohnya, karena informasi yang diwajibkan bersifat rahasia atau tunduk pada batasan hukum), berarti organisasi diwajibkan menyebutkan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi, dan menyediakan alasan tidak mencantumkannya disertai dengan penjelasan dalam indeks konten GRI. Lihat [Persyaratan 6](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang alasan pengabaian.

Jika organisasi tidak dapat melaporkan informasi yang diwajibkan tentang pokok perihal yang ditentukan dalam pengungkapan karena pokok perihal tersebut (contohnya, komite, kebijakan, praktik, proses) tidak ada, organisasi dapat mematuhi persyaratan dengan melaporkan bahwa demikian adanya. Organisasi dapat menjelaskan alasan tidak mencantumkan pokok perihal tersebut atau menguraikan setiap rencana untuk mengembangkannya. Pengungkapan tidak mewajibkan organisasi untuk mengimplementasikan pokok perihal (contohnya, mengembangkan kebijakan) tetapi diwajibkan untuk melaporkan bahwa pokok perihal tersebut tidak ada.

Persyaratan, panduan, dan istilah yang didefinisikan

Hal berikut berlaku di seluruh Standar GRI:

Persyaratan disajikan dalam **huruf tebal** dan ditunjukkan dengan kata 'harus'. Organisasi harus mematuhi seluruh persyaratan untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.

Persyaratan dapat disertai dengan panduan.

Panduan mencantumkan informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan tersebut. Organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi panduan.

Standar juga dapat mencakup rekomendasi. Hal-hal ini adalah keadaan-keadaan di mana suatu tindakan tertentu disarankan tetapi tidak diwajibkan.

Kata 'sebaiknya' menunjukkan rekomendasi, dan kata 'dapat' menunjukkan kemungkinan atau pilihan.

Istilah yang didefinisikan digarisbawahi dalam teks Standar GRI dan dikaitkan dengan definisinya pada [Daftar Istilah](#). Organisasi diwajibkan untuk menerapkan definisi di dalam Daftar Istilah.

Format pelaporan

Dalam Standar GRI, istilah 'pelaporan keberlanjutan' berarti proses pelaporan, yang dimulai dengan organisasi menentukan topik material berdasarkan pada dampak yang paling signifikan dan berakhir dengan organisasi tersebut melaporkan informasi tentang dampak ini secara publik.

Organisasi dapat memublikasikan atau membuat informasi dapat diakses dalam berbagai format (contohnya, elektronik atau berbasis kertas) di satu atau beberapa lokasi (contohnya, laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, halaman web, laporan tahunan). Istilah 'melaporkan' dan 'informasi yang dilaporkan' dalam Standar GRI berarti informasi yang dilaporkan di seluruh lokasi.

Indeks konten GRI menyediakan ikhtisar dari informasi yang dilaporkan organisasi dan menunjukkan lokasi tempat pengguna informasi dapat menemukannya. Indeks konten juga menunjukkan Standar GRI dan pengungkapan mana yang telah digunakan oleh organisasi.

Jika organisasi bermaksud untuk memublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, organisasi tersebut tidak perlu mengulangi informasi yang telah dilaporkan secara publik di tempat lain, seperti di halaman web atau dalam laporan tahunannya. Dalam kasus tersebut, organisasi dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menyediakan rujukan di indeks konten GRI tentang di mana informasi ini dapat ditemukan (contohnya, dengan menyediakan tautan ke halaman web atau mengutip halaman di laporan tahunan tempat informasi tersebut telah dipublikasikan).

Tanggal berlaku

Semua Standar GRI memiliki tanggal berlaku. Ini adalah tanggal dari ketika informasi yang dipublikasikan oleh organisasi harus menggunakan Standar GRI tertentu. Semua informasi yang dipublikasikan setelah tanggal berlakunya suatu Standar harus menggunakan Standar tersebut.

Contohnya, *GRI 1: Landasan 2021* memiliki tanggal berlaku 1 Januari 2023. Ini berarti bahwa organisasi harus menggunakan *GRI 1* untuk informasi yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Januari 2023.

Tanggal berlaku ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa organisasi mungkin perlu waktu untuk menerapkan Standar yang baru atau yang direvisi. Penerapan Standar sebelum tanggal berlakunya disarankan, karena hal ini memungkinkan organisasi untuk membuat laporan sesuai dengan praktik terbaik.

2. Konsep utama

Bagian ini menjelaskan konsep yang menjadi dasar untuk pelaporan keberlanjutan. Memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam Standar GRI sangat penting bagi mereka yang mengumpulkan dan mempersiapkan informasi untuk pelaporan dan bagi mereka yang menafsirkan informasi yang dilaporkan menggunakan Standar tersebut.

Konsep utama yang dicakup dalam bagian ini adalah: dampak, topik material, uji tuntas, dan pemangku kepentingan. Tujuan Standar ini adalah memungkinkan organisasi melaporkan informasi tentang dampak mereka yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia mereka – dalam Standar GRI ini disebut sebagai topik material. Uji tuntas dan keterlibatan pemangku kepentingan membantu organisasi mengidentifikasi dampak mereka yang paling signifikan.

2.1 Dampak

Dalam Standar GRI, dampak berarti pengaruh yang dimiliki atau mungkin dimiliki oleh organisasi pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk pengaruh pada hak asasi manusia, sebagai akibat dari kegiatan atau hubungan bisnis organisasi. Dampak dapat bersifat aktual atau potensial, negatif atau positif, jangka pendek atau jangka panjang, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat dipulihkan atau tidak dapat dipulihkan. Dampak ini menunjukkan kontribusi organisasi, negatif atau positif, terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dampak organisasi terhadap ekonomi berarti dampak terhadap sistem ekonomi di tingkat daerah, nasional, dan global. Organisasi dapat memiliki dampak terhadap ekonomi melalui, contohnya, praktik persaingan, praktik pengadaan, dan pajak serta pembayaran pajak kepada pemerintah.

Dampak organisasi terhadap lingkungan berarti dampak terhadap organisme hidup dan elemen tak hidup, termasuk udara, tanah, air, dan ekosistem. Organisasi dapat memiliki dampak terhadap lingkungan melalui, contohnya, penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya alam lainnya.

Dampak organisasi terhadap masyarakat berarti dampak terhadap individu dan kelompok, seperti komunitas, kelompok rentan, atau masyarakat. Hal ini mencakup dampak organisasi terhadap hak asasi manusia. Organisasi dapat memiliki dampak terhadap masyarakat melalui, contohnya, praktik penawaran kerja (contohnya, gaji yang dibayarkan kepada karyawan), rantai pasokan (contohnya, kondisi kerja di pemasok), dan produk dan layanannya (contohnya, keselamatan atau aksesibilitasnya). Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang terpengaruh atau dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi disebut sebagai pemangku kepentingan (lihat [bagian 2.4](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut).

Dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat saling berkaitan. Contohnya, dampak organisasi terhadap ekonomi dan lingkungan dapat menyebabkan dampak terhadap masyarakat dan hak asasi manusia mereka. Demikian pula, dampak positif organisasi dapat mengakibatkan dampak negatif dan sebaliknya. Contohnya, dampak positif organisasi terhadap lingkungan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat dan hak asasi manusia.

2.2 Topik material

Organisasi dapat mengidentifikasi banyak dampak yang akan dilaporkan. Ketika menggunakan Standar GRI, organisasi memprioritaskan pelaporan pada topik tersebut yang mencerminkan dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia. Pada Standar GRI, topik tersebut merupakan topik material organisasi.

Contoh topik material adalah antikorupsi, kesehatan dan keselamatan kerja, atau air dan limbah. Topik tidak perlu dibatasi pada dampak terhadap ekonomi, lingkungan, atau masyarakat; topik dapat mencakup dampak di ketiga dimensi tersebut. Contohnya, organisasi mungkin menentukan bahwa 'air dan efluen' adalah topik material berdasarkan pada dampak yang disebabkan oleh penggunaan air terhadap ekosistem dan akses air komunitas lokal. Standar GRI mengelompokkan dampak berdasarkan topik, seperti 'air dan efluen', untuk membantu organisasi melaporkan beberapa dampak secara terpadu yang terkait dengan topik yang sama.

Proses dalam menentukan topik material didasarkan atas identifikasi dan penilaian dampak yang berlanjut oleh

organisasi. Identifikasi dan penilaian dampak yang berlanjut yang melibatkan pemangku kepentingan dan pakar terkait dan dilaksanakan secara terpisah dari proses pelaporan keberlanjutan. Lihat [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang cara menentukan topik material.

Kotak 1. Pelaporan keberlanjutan dan pelaporan finansial dan penciptaan nilai

Standar GRI memungkinkan organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampak paling signifikan dari kegiatan dan hubungan bisnis organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia. Dampak tersebut terutama penting bagi pembangunan berkelanjutan dan bagi pemangku kepentingan organisasi, dan dampak tersebut adalah fokus pelaporan keberlanjutan.

Dampak kegiatan dan hubungan bisnis organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dapat memiliki konsekuensi negatif dan positif bagi organisasi itu sendiri. Konsekuensi ini dapat bersifat operasional atau reputasi, dan oleh karena itu juga bersifat finansial. Contohnya, tingginya penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui oleh organisasi turut berkontribusi pada perubahan iklim dan pada waktu bersamaan dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional bagi organisasi karena adanya undang-undang yang bertujuan mengalihkan penggunaan energi ke sumber terbarukan.

Meskipun tidak bersifat finansial pada waktu pelaporan, sebagian besar (jika tidak semua) dampak kegiatan dan hubungan bisnis organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat pada akhirnya akan menjadi persoalan material finansial. Oleh karena itu, dampaknya juga penting bagi mereka yang berkepentingan terhadap kinerja finansial organisasi dan keberhasilan jangka panjang. Memahami dampak ini adalah langkah pertama yang diperlukan dalam menentukan persoalan material finansial untuk organisasi.

Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan sangat penting untuk pelaporan finansial dan penciptaan nilai. Informasi yang tersedia melalui pelaporan keberlanjutan menyediakan masukan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang finansial yang terkait dengan dampak organisasi dan untuk valuasi finansial. Selanjutnya, hal ini membantu membuat pertimbangan materialitas finansial tentang apa yang perlu diidentifikasi dalam laporan finansial.

Meskipun dampak kegiatan dan hubungan bisnis organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dapat menjadi material finansial, pelaporan keberlanjutan juga sangat relevan dalam menjalankan kegiatan kepentingan publik. Pelaporan keberlanjutan bersifat terpisah dari pertimbangan implikasi finansial. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menyusun laporan tentang semua topik material yang telah mereka tentukan dengan menggunakan Standar GRI. Topik material ini tidak dapat dikurangi prioritasnya dengan alasan tidak dianggap material secara finansial oleh organisasi.

2.3 Uji tuntas

Dalam Standar GRI, uji tuntas berarti proses yang dijalani organisasi dalam mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan cara organisasi menangani dampak negatif aktual dan potensial organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia mereka. Organisasi sebaiknya menangani potensi dampak negatif melalui pencegahan atau mitigasi. Organisasi sebaiknya menangani dampak negatif aktual melalui tindakan pemulihan dalam kondisi di mana organisasi mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif tersebut.

Cara organisasi terlibat dengan dampak negatif (yaitu, apakah mereka yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak tersebut, atau apakah dampak tersebut terkait langsung dengan hubungan bisnisnya) menentukan cara organisasi sebaiknya menangani dampak tersebut. Itu juga menentukan apakah organisasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan atau bekerja sama dalam tindakan pemulihan dampak. Organisasi sebaiknya:

- menghindari timbulnya penyebab dampak negatif atau berkontribusi pada terjadinya dampak negatif akibat kegiatan mereka, dan menangani dampak tersebut ketika terjadi dengan menyediakan atau bekerja sama dalam tindakan pemulihan melalui proses yang sah secara hukum;
- apabila dampak negatif yang secara langsung terkait dengan operasional, produk, atau layanan organisasi karena hubungan bisnisnya, upayakan untuk mencegah atau memitigasi dampak ini meskipun organisasi tidak berkontribusi terhadap dampak negatif tersebut. Organisasi tidak bertanggung jawab untuk menyediakan atau

bekerja sama dalam tindakan pemulihan dari dampak ini, tetapi mereka dapat memiliki peranan dalam tindakan pemulihan tersebut.

Jika tidak memungkinkan untuk menangani semua dampak yang teridentifikasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat sekaligus, organisasi sebaiknya memprioritaskan urutan dalam menangani potensi dampak negatif berdasarkan pada tingkat keparahan dan kemungkinannya. Dalam kasus potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia, tingkat keparahan dampak tersebut lebih diprioritaskan dibandingkan tingkat kemungkinannya. Lihat [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut.

Uji tuntas diuraikan oleh *Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* [5], *Panduan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk Perusahaan Multinasional* [3], dan *Panduan Uji Tuntas OECD untuk Tata Cara Bisnis yang Bertanggung Jawab* [2].

2.4 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang terpengaruh atau dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi. Kategori umum pemangku kepentingan untuk organisasi adalah mitra bisnis, organisasi masyarakat sipil, konsumen, pelanggan, karyawan dan pekerja lainnya, pemerintah, komunitas lokal, organisasi nonpemerintah, pemegang saham dan investor lain, pemasok, serikat pekerja, dan kelompok rentan.

Dalam Standar GRI, kepentingan (atau 'ketertarikan') adalah sesuatu yang bernilai bagi individu atau kelompok, yang dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi. Pemangku kepentingan dapat memiliki lebih dari satu kepentingan. Tidak semua kepentingan sama pentingnya dan semua kepentingan tidak perlu diperlakukan secara setara. Hak asasi manusia memiliki status tertentu sebagai pemberian hak pada semua orang berdasarkan undang-undang internasional. Dampak paling akut yang dapat diakibatkan oleh organisasi terhadap masyarakat adalah dampak yang berpengaruh negatif pada hak asasi manusia. Istilah 'pemegang hak' merujuk kepada pemangku kepentingan yang hak asasi manusia individual atau kolektifnya (yang dimiliki oleh kelompok seperti masyarakat adat) sudah atau dapat terpengaruh.

Kepentingan pemangku kepentingan dapat terpengaruh secara negatif atau positif oleh kegiatan organisasi. Uji tuntas berfokus untuk mengidentifikasi kepentingan pemangku kepentingan yang sudah atau dapat terpengaruh secara negatif oleh kegiatan organisasi.

Tidak semua pemangku kepentingan akan memiliki hubungan langsung dengan organisasi. Contoh, pekerja rantai pasokan organisasi juga dapat menjadi pemangku kepentingan, atau bisa juga individu atau sekelompok orang yang tinggal jauh dari lokasi operasi organisasi yang sudah atau berpotensi terpengaruh oleh operasi ini. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka adalah pemangku kepentingan dari organisasi tersebut, terutama jika mereka belum terpengaruh oleh kegiatan organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi kepentingan dari pemangku kepentingan seperti ini dan yang lain yang tidak dapat menyampaikan pendapat mereka (contohnya, generasi masa depan).

Pelibatan pemangku kepentingan membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola dampak negatif dan positifnya. Tidak semua pemangku kepentingan terpengaruh oleh semua kegiatan organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang kepentingannya harus diperhitungkan sehubungan dengan kegiatan tertentu (yaitu, 'pemangku kepentingan terkait').

Apabila pelibatan langsung seluruh pemangku kepentingan terkait tidak memungkinkan, organisasi dapat melibatkan perwakilan pemangku kepentingan yang kredibel atau organisasi proksi (contohnya, organisasi nonpemerintah, serikat pekerja).

Selain melibatkan pemangku kepentingan, organisasi dapat berkonsultasi dengan pakar di bidang atau konteks tertentu (contoh, akademisi, organisasi nonpemerintah) untuk mendapatkan nasihat dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak.

Terkadang, perlu untuk membedakan antara pemangku kepentingan yang kepentingannya sudah terpengaruh (yaitu, 'pemangku kepentingan terpengaruh'), dan mereka yang kepentingannya belum terpengaruh tetapi berpotensi terpengaruh (yaitu, 'pemangku kepentingan yang berpotensi terpengaruh'). Perbedaan ini penting dalam uji tuntas. Contoh, jika kegiatan organisasi menyebabkan bahaya keselamatan, pekerja yang cedera karena bahaya tersebut adalah pemangku kepentingan terpengaruh, dan pekerja yang belum mengalami cedera tetapi terpapar bahaya dan

mungkin menjadi cedera adalah pemangku kepentingan yang berpotensi terpengaruh. Perbedaan antara pemangku kepentingan terpengaruh dan berpotensi terpengaruh membantu mengidentifikasi pekerja mana yang harus menerima tindakan perbaikan.

Lihat rujukan [2] dalam [Daftar Pustaka](#).

3. Pelaporan sesuai dengan Standar GRI

Pelaporan sesuai dengan Standar GRI memungkinkan organisasi untuk menyediakan gambaran komprehensif terkait dampak paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia, serta cara organisasi mengelola dampaknya. Hal ini memungkinkan pengguna informasi membuat penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi terkait dampak organisasi dan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan.

Organisasi harus mematuhi semua sembilan persyaratan dalam bagian ini untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.

Ikhtisar persyaratan kesesuaian

Persyaratan 1:	Menerapkan prinsip pelaporan
Persyaratan 2:	Melaporkan pengungkapan GRI 2: Pengungkapan Umum 2021
Persyaratan 3:	Menentukan topik material
Persyaratan 4:	Melaporkan pengungkapan GRI 3: Topik Material 2021
Persyaratan 5:	Melaporkan pengungkapan Standar Topik GRI untuk setiap topik material
Persyaratan 6:	Menyediakan alasan tidak mencantumkan untuk pengungkapan dan persyaratan yang tidak dapat dipatuhi oleh organisasi
Persyaratan 7:	Memublikasikan indeks konten GRI
Persyaratan 8:	Menyediakan pernyataan penggunaan
Persyaratan 9:	Memberi tahu GRI

Jika organisasi tidak mematuhi semua sembilan persyaratan, maka organisasi tidak dapat mengklaim bahwa mereka telah mempersiapkan informasi yang dilaporkan sesuai dengan Standar GRI. Dalam kasus tersebut, organisasi dapat mengklaim bahwa mereka telah mempersiapkan informasi yang dilaporkan dengan merujuk pada Standar GRI, dengan syarat mereka mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam '[Pelaporan dengan merujuk pada Standar GRI](#)' pada akhir bagian ini.

Persyaratan 1: Menerapkan prinsip pelaporan

- a. Organisasi harus menerapkan semua prinsip pelaporan yang disebutkan pada [bagian 4 dari GRI 1: Landasan 2021](#).

Persyaratan 2: Melaporkan pengungkapan GRI 2: Pengungkapan Umum 2021

- a. Organisasi harus melaporkan semua pengungkapan [GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#).

Panduan

Alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk semua pengungkapan pada [GRI 2](#) kecuali untuk:

- Pengungkapan 2-1 Rincian organisatoris
- Pengungkapan 2-2 Entitas yang dicantumkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi
- Pengungkapan 2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan
- Pengungkapan 2-4 Penyajian kembali informasi
- Pengungkapan 2-5 Penjaminan eksternal

Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan yang alasan tidak mencantumkan diizinkan, maka organisasi diwajibkan untuk menentukan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten GRI, dan menyediakan alasan tidak mencantumkan disertai penjelasan. Lihat [Persyaratan 6](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang alasan tidak mencantumkan.

Persyaratan 3: Menentukan topik material

Organisasi harus:

- a. menentukan topik material;
- b. meninjau Standar Sektor GRI yang berlaku pada sektor mereka dan:
 - i. menentukan apakah setiap topik dalam Standar Sektor yang berlaku adalah topik material untuk organisasi;
 - ii. mencantumkan dalam indeks konten GRI, setiap topik dari Standar Sektor yang berlaku yang ditentukan oleh organisasi sebagai bukan material dan menjelaskan mengapa topik tersebut bukan material.

Panduan

Lihat [bagian 1 GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk panduan tentang cara menentukan topik material.

Organisasi diwajibkan untuk menentukan topik material berdasarkan pada kondisi spesifiknya.

Penggunaan Standar Sektor GRI mendukung organisasi dalam proses ini. Standar Sektor menyediakan informasi untuk organisasi mengenai mana yang berpotensi menjadi topik material mereka.

Organisasi diwajibkan untuk menggunakan Standar Sektor yang berlaku ketika menentukan topik material mereka.

Panduan untuk 3-b

Organisasi diwajibkan untuk mematuhi Persyaratan 3-b hanya jika Standar Sektor GRI yang berlaku untuk sektor tersebut tersedia.

Organisasi diwajibkan untuk meninjau setiap topik yang dideskripsikan dalam Standar Sektor yang berlaku dan menentukan apakah itu adalah topik material untuk organisasi. Jika organisasi telah menentukan salah satu dari topik yang dicantumkan dalam Standar Sektor yang berlaku sebagai bukan material, maka organisasi diwajibkan untuk mencantumkan topik tersebut dalam indeks konten GRI dan menjelaskan mengapa topik tersebut bukan topik material. Lihat [Persyaratan 7](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang indeks konten.

Lihat [bagian 1 pada GRI 3](#) dan Standar Sektor GRI untuk panduan tentang cara menggunakan Standar Sektor untuk menentukan topik material.

Persyaratan 4: Melaporkan pengungkapan GRI 3: Topik Material 2021

Organisasi harus:

- a. melaporkan proses mereka dalam menentukan topik material menggunakan [Pengungkapan 3-1](#) ;
- b. melaporkan daftar topik material menggunakan [Pengungkapan 3-2](#) ;
- c. melaporkan bagaimana mereka mengelola setiap topik material menggunakan [Pengungkapan 3-3](#).

Panduan

Alasan tidak mencantumkan hanya diizinkan untuk [Pengungkapan 3-3 Manajemen topik material pada GRI 3](#).

Jika organisasi tidak dapat mematuhi Pengungkapan 3-3 atau persyaratan Pengungkapan 3-3, berarti organisasi diwajibkan untuk menyebutkan ini dalam indeks konten GRI, dan untuk menyediakan alasan tidak mencantumkan disertai dengan penjelasan. Lihat [Persyaratan 6](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang alasan tidak mencantumkan.

Persyaratan 5: Melaporkan pengungkapan dari Standar Topik GRI untuk setiap topik material

Organisasi harus:

- a. melaporkan pengungkapan dari Standar Topik GRI untuk setiap topik material;
- b. untuk setiap topik material yang dicakup dalam Standar Sektor GRI yang berlaku, maka:
 - i. laporkan pengungkapan dari Standar Topik GRI yang tercantum untuk topik tersebut dalam Standar Sektor, atau;
 - ii. nyatakan alasan tidak mencantumkan 'tidak berlaku' dan penjelasan yang diwajibkan dalam indeks konten GRI.

Panduan untuk 5-a

Untuk setiap topik material, organisasi perlu mengidentifikasi pengungkapan dari Standar Topik GRI yang akan dilaporkan. Organisasi diwajibkan untuk hanya melaporkan pengungkapan yang relevan dengan dampak yang terkait dengan topik material. Organisasi tidak diwajibkan untuk melaporkan pengungkapan yang tidak relevan.

Tidak ada persyaratan jumlah minimum untuk pengungkapan yang dilaporkan dari Standar Topik. Jumlah pengungkapan yang dilaporkan oleh organisasi adalah berdasarkan pada penilaian mereka tentang pengungkapan mana yang relevan terhadap dampak terkait dengan topik materialnya.

Organisasi mungkin perlu menggunakan lebih dari satu Standar Topik untuk melaporkan sebuah topik material. Selain itu, tidak semua pengungkapan dalam Standar Topik menjadi relevan untuk dilaporkan oleh organisasi. Contoh, organisasi mengidentifikasi kesetaraan upah sebagai topik material. Organisasi menentukan bahwa pengungkapan berikut relevan untuk dilaporkan tentang topik: [Pengungkapan 202-1 Rasio upah tingkat pemula standar berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan upah minimum regional](#) dalam *GRI 202: Keberadaan Pasar 2016*, dan [Pengungkapan 405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi wanita terhadap pria](#) dalam *GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016*. Organisasi tidak diwajibkan untuk melaporkan pengungkapan lain dari Standar ini (contohnya, [Pengungkapan 202-2 Proporsi manajemen senior yang dipekerjakan dari komunitas lokal](#) dalam *GRI 202*), karena pengungkapan ini tidak membahas topik kesetaraan upah.

Ketika sebuah topik material tercakup dalam Standar Sektor GRI yang berlaku, maka organisasi menggunakan Standar Sektor untuk mengidentifikasi pengungkapan untuk dilaporkan. Lihat [Persyaratan 5-b](#) pada Standar ini untuk informasi lebih lanjut.

Alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk semua pengungkapan dalam Standar Topik. Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan, maka organisasi diwajibkan untuk menyebutkan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten GRI, dan menyediakan alasan tidak mencantumkan disertai penjelasannya. Lihat [Persyaratan 6](#) pada Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang alasan tidak mencantumkan.

Organisasi harus memberikan informasi yang cukup tentang dampaknya dalam kaitannya dengan setiap topik material sehingga pengguna informasi dapat membuat penilaian dan keputusan berdasarkan informasi tentang organisasi. Jika pengungkapan pada Standar Topik tidak menyediakan informasi yang memadai tentang dampak organisasi, maka organisasi sebaiknya melaporkan pengungkapan tambahan. Ini dapat mencakup pengungkapan sektor tambahan yang disarankan pada Standar Sektor GRI, pengungkapan dari sumber lain, atau pengungkapan yang dikembangkan sendiri oleh organisasi.

Pengungkapan yang dilaporkan oleh organisasi dari sumber lain atau yang dikembangkan sendiri oleh organisasi, harus memiliki ketelitian yang sama dengan pengungkapan dari Standar GRI, dan pengungkapan tersebut harus selaras dengan ekspektasi yang ditetapkan dalam instrumen resmi antarpemerintah.

Pelaporan tentang topik material yang tidak dicakup pada Standar Topik GRI

Ketika topik material organisasi tidak dicakup oleh pengungkapan pada Standar Topik GRI, organisasi wajib melaporkan cara mereka mengelola topik material tersebut, menggunakan [Pengungkapan 3-3 pada GRI 3: Topik Material 2021](#). Lihat [Persyaratan 4-c](#) pada Standar ini untuk informasi lebih lanjut.

Selain melaporkan Pengungkapan 3-3, organisasi sebaiknya melaporkan pengungkapan lain untuk topik tersebut. Ini dapat mencakup pengungkapan sektor tambahan yang disarankan pada Standar Sektor GRI, pengungkapan dari sumber lain, atau pengungkapan yang dikembangkan sendiri oleh organisasi.

Contoh, organisasi menentukan bahwa kebebasan berbicara adalah topik material. Karena tidak ada Standar Topik yang mencakup topik ini, organisasi sebaiknya melaporkan pengungkapan dengan menggunakan sumber lain atau

mengembangkan sendiri pengungkapannya untuk melaporkan topik tersebut. Organisasi masih diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola topik kebebasan berbicara, menggunakan [Pengungkapan 3-3 pada GRI 3](#).

Panduan untuk 5-b

Organisasi diwajibkan untuk mematuhi Persyaratan 5-b hanya jika Standar Sektor GRI yang berlaku untuk sektor tersebut tersedia. Standar Sektor menyediakan informasi untuk organisasi mengenai mana yang berpotensi untuk menjadi topik material mereka.

Organisasi diwajibkan untuk meninjau setiap topik yang dideskripsikan pada Standar Sektor yang berlaku dan menentukan apakah itu adalah topik material untuk organisasi.

Jika organisasi menentukan bahwa suatu topik pada Standar Sektor yang berlaku bersifat material, Standar Sektor tersebut membantu organisasi mengidentifikasi pengungkapan untuk melaporkan informasi tentang dampak mereka yang terkait dengan topik tersebut. Untuk setiap topik yang berpotensi material, Standar Sektor mencantumkan pengungkapan dari Standar Topik GRI untuk dilaporkan oleh organisasi. Jika salah satu dari pengungkapan Standar Topik yang tercantum pada Standar Sektor tidak relevan dengan dampak organisasi, organisasi tidak diwajibkan untuk melaporkan pengungkapan ini. Namun, organisasi diwajibkan untuk mendaftarkan pengungkapan ini dalam indeks konten GRI dan menyatakan 'tidak berlaku' sebagai alasan tidak mencantumkan untuk tidak melaporkan pengungkapan tersebut. Organisasi juga diwajibkan untuk menjelaskan secara singkat mengapa pengungkapan tersebut tidak relevan terhadap dampak organisasi terkait dengan topik material tersebut. Lihat [Persyaratan 6](#) pada Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang alasan tidak mencantumkan.

Perhatikan bahwa ketika melaporkan pengungkapan Standar Topik yang tercantum pada Standar Sektor, organisasi masih dapat menggunakan salah satu dari empat alasan untuk tidak mencantumkan yang dicakup pada [Tabel 1](#) dari Standar ini jika mereka tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan.

Selain pengungkapan dari Standar Topik, Standar Sektor dapat mencantumkan pengungkapan sektor tambahan untuk dilaporkan oleh organisasi. Melaporkan pengungkapan sektor tambahan ini adalah rekomendasi. Organisasi tidak diwajibkan untuk menyediakan alasan tidak mencantumkan untuk pengungkapan sektor tambahan yang tidak mereka laporkan.

Persyaratan 6: Menyediakan alasan tidak mencantumkan untuk pengungkapan dan persyaratan yang tidak dapat dipatuhi oleh organisasi

- a. Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan sedangkan alasan tidak mencantumkan diizinkan, maka dalam indeks konten GRI, organisasi harus:
 - i. menentukan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi;
 - ii. menyediakan salah satu dari empat alasan untuk tidak mencantumkan yang disertakan pada Tabel 1 dan penjelasan yang diwajibkan untuk alasan tersebut.

Tabel 1. Alasan tidak mencantumkan yang diizinkan dan penjelasan yang diwajibkan

ALASAN TIDAK PENGABAIAAN	PENJELASAN YANG DIWAJIBKAN
Tidak berlaku	Jelaskan mengapa pengungkapan atau persyaratan dianggap tidak berlaku.
Larangan hukum	Deskripsikan larangan hukum secara spesifik
Kendala kerahasiaan	Jelaskan kendala kerahasiaan tersebut.
Informasi tidak tersedia/tidak lengkap	Tentukan informasi mana yang tidak tersedia atau tidak lengkap. Ketika informasi tidak lengkap, tentukan bagian mana yang tidak ada (contohnya, tentukan entitas yang informasinya tidak ada). Jelaskan mengapa informasi yang diwajibkan tidak tersedia atau tidak lengkap. Jelaskan langkah yang diambil dan kerangka waktu yang diharapkan untuk memperoleh informasi tersebut.

Panduan

Alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk semua pengungkapan dari Standar GRI kecuali untuk:

- Pengungkapan 2-1 Detail organisasi
- Pengungkapan 2-2 Entitas yang dicantumkan pada pelaporan keberlanjutan organisasi
- Pengungkapan 2-3 Periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak
- Pengungkapan 2-4 Penyajian kembali informasi
- Pengungkapan 2-5 Penjaminan eksternal
- Pengungkapan 3-1 Proses untuk menentukan topik material
- Pengungkapan 3-2 Daftar topik material

Organisasi hanya diizinkan untuk menyediakan salah satu dari empat alasan tidak mencantumkan yang disertakan pada [Tabel 1](#) dari Standar ini:

Tidak berlaku

Organisasi menyatakan 'tidak berlaku' sebagai alasan tidak mencantumkan dalam situasi berikut:

- Ketika pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan tidak berlaku untuk organisasi berdasarkan pada karakteristiknya (contohnya, ukuran, jenis). Contoh, [2-15-b-iii dalam GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#) mewajibkan organisasi untuk melaporkan apakah konflik kepentingan yang berkaitan dengan adanya pemegang saham yang mengendalikan organisasi diungkapkan kepada pemangku kepentingan. Persyaratan ini tidak berlaku untuk organisasi yang tidak memiliki pemegang saham (contohnya, yayasan).

Dalam kasus seperti ini, organisasi diwajibkan untuk menjelaskan mengapa pengungkapan atau persyaratan tersebut tidak berlaku untuk organisasi.

Namun, mungkin ada kasus di mana pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan berlaku untuk organisasi, tetapi saat ini organisasi tidak memiliki pokok perihal yang disebutkan dalam pengungkapan atau dalam persyaratan (contohnya, komite, kebijakan, praktik, proses). Contohnya, [2-23-b pada GRI 2](#) mewajibkan organisasi untuk mendeskripsikan komitmen kebijakan mereka untuk menghormati hak asasi manusia. Ekspektasi ini berlaku untuk setiap organisasi. Semua organisasi diharapkan memiliki komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia, tetapi tidak setiap organisasi telah mengembangkan komitmen kebijakan seperti itu.

Jika organisasi tidak dapat melaporkan informasi yang diwajibkan tentang pokok perihal yang ditentukan pada pengungkapan karena pokok perihal tersebut (contoh, komite, kebijakan, praktik, proses) tidak ada, maka mereka masih dapat mematuhi persyaratan dengan melaporkan bahwa pokok perihal tersebut tidak ada. Organisasi tidak perlu menyatakan alasan tidak mencantumkan karena 'tidak berlaku'.

Dalam kasus tersebut, organisasi dapat menjelaskan alasan tidak memiliki pokok perihal ini atau menjelaskan rencana untuk mengembangkannya. Pengungkapan tidak mewajibkan organisasi untuk mengimplementasikan pokok perihal tersebut (contohnya, mengembangkan kebijakan), tetapi melaporkan bahwa pokok perihal tersebut tidak ada.

- Ketika pengungkapan dari Standar Topik GRI yang tercantum pada Standar Sektor GRI yang berlaku tidak relevan dengan dampak organisasi terkait dengan topik material. Untuk kasus seperti ini, organisasi diwajibkan untuk menjelaskan mengapa pengungkapan tidak relevan dengan dampak organisasi terkait dengan topik material.

Larangan hukum

Organisasi menyatakan 'larangan hukum' sebagai alasan tidak mencantumkan ketika undang-undang melarang pengumpulan informasi yang diwajibkan tersebut atau melarang pelaporan informasi tersebut kepada publik.

Kendala kerahasiaan

Mungkin ada kasus di mana undang-undang tidak melarang pengumpulan atau pelaporan informasi yang diwajibkan, tetapi organisasi menganggap informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat melaporkannya secara publik. Untuk kasus seperti ini, organisasi menyatakan 'kendala kerahasiaan' sebagai alasan tidak mencantumkan.

Informasi tidak tersedia/tidak lengkap

Mungkin ada kasus di mana organisasi memiliki pokok perihal yang disebutkan dalam pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan, tetapi informasi tentang pokok perihal tersebut tidak tersedia atau tidak lengkap. Untuk kasus seperti ini, organisasi menyatakan 'informasi tidak tersedia/tidak lengkap' sebagai alasan tidak mencantumkan. Contoh, informasi tidak tersedia untuk [Pengungkapan 305-3 pada GRI 305: Emisi 2016](#) ketika

organisasi memiliki emisi gas rumah kaca (GHG) tidak langsung (Cakupan 3), tetapi organisasi belum mengumpulkan data emisi GHG tidak langsung (Cakupan 3) lainnya.

Ketika organisasi tidak dapat melaporkan bagian informasi yang diwajibkan, berarti informasi tersebut tidak lengkap. Ketika informasi yang dilaporkan tidak mencakup ruang lingkup lengkap yang diwajibkan oleh pengungkapan tersebut (contoh, hilangnya informasi untuk entitas, situs/tempat, lokasi geografis tertentu), maka organisasi diwajibkan untuk menyatakan 'informasi tidak tersedia/tidak lengkap' sebagai alasan tidak mencantumkan. Organisasi harus menyebutkan mana entitas, situs/tempat, lokasi geografis, dll. yang informasi yang diwajibkannya tidak ada dan tidak dapat dilaporkan.

Seluruh, atau sebagian informasi yang diwajibkan, mungkin tidak tersedia ketika, contohnya, informasi tersebut tidak dapat diperoleh atau tidak layak kualitasnya untuk dilaporkan. Hal ini dapat terjadi ketika informasi dikumpulkan dari organisasi lain, seperti pemasok.

Alasan 'kendala kerahasiaan' dan 'informasi tidak tersedia/tidak lengkap' sebaiknya hanya digunakan dalam kasus luar biasa. Jika sering menggunakan 'kendala kerahasiaan' dan 'informasi tidak tersedia/tidak lengkap' sebagai alasan tidak mencantumkan informasi maka akan mengurangi kredibilitas dan kegunaan pelaporan keberlanjutan organisasi. Tindakan ini tidak sejalan dengan tujuan pelaporan sesuai dengan Standar GRI, yang bertujuan menyediakan gambaran komprehensif tentang dampak paling signifikan dari organisasi.

Organisasi tidak diperbolehkan menggunakan alasan tidak mencantumkan lain selain alasan yang disertakan pada [Tabel 1](#) dari Standar ini.

Organisasi diwajibkan untuk melaporkan alasan tidak mencantumkan dalam indeks konten GRI. Lihat [Persyaratan 7](#) pada Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang indeks konten.

Persyaratan 7: Memublikasikan indeks konten GRI

Organisasi harus:

- a. memublikasikan indeks konten GRI yang mencantumkan:
 - i. judul: indeks konten GRI;
 - ii. pernyataan penggunaan;
 - iii. judul GRI 1 yang digunakan;
 - iv. judul Standar Sektor GRI yang berlaku untuk sektor organisasi;
 - v. daftar topik material organisasi;
 - vi. daftar topik yang ditentukan sebagai bukan material dari Standar Sektor GRI yang berlaku dan penjelasan mengapa topik tersebut menjadi bukan material;
 - vii. daftar pengungkapan yang dilaporkan, termasuk judul pengungkapan;
 - viii. judul Standar GRI dan sumber lain yang menjadi rujukan pengungkapan yang dilaporkan;
 - ix. untuk organisasi yang tidak melaporkan pengungkapan Standar Topik GRI untuk topik material dari Standar Sektor GRI yang berlaku, daftar pengungkapan dan alasan tidak mencantumkan yang diwajibkan;
 - x. nomor rujukan Standar Sektor GRI untuk pengungkapan dari Standar Sektor yang berlaku;
 - xi. lokasi tempat informasi yang dilaporkan untuk setiap pengungkapan dapat ditemukan;
 - xii. setiap alasan tidak mencantumkan yang digunakan;
- b. jika organisasi memublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri dan indeks konten GRI tidak dicantumkan dalam laporan, sediakan tautan atau rujukan ke indeks konten GRI dalam laporan.

Panduan

Informasi yang dilaporkan menggunakan Standar GRI dapat dipublikasi atau diakses dalam berbagai format (contohnya, elektronik, berbasis kertas) di satu atau beberapa lokasi (contohnya, laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, halaman web, laporan tahunan). Indeks konten GRI menyediakan ikhtisar dari informasi yang dilaporkan organisasi, menunjukkan di mana informasi yang dilaporkan dapat ditemukan, dan membantu pengguna informasi mengakses informasi ini. Indeks konten juga menunjukkan Standar GRI dan pengungkapan mana yang telah digunakan oleh organisasi.

[Lampiran 1](#) dari Standar ini menyediakan panduan tentang cara mempersiapkan indeks konten GRI ketika melaporkan sesuai dengan Standar GRI. Panduan tersebut disertai contoh yang dapat digunakan organisasi untuk mempersiapkan indeks konten. Organisasi dapat menggunakan format berbeda untuk indeks konten selain format yang disediakan pada Lampiran 1, selama format tersebut mematuhi persyaratan untuk indeks konten.

Persyaratan 8: Menyediakan pernyataan penggunaan

- a. Organisasi harus menyertakan pernyataan berikut pada indeks konten GRI mereka:
[Nama organisasi] telah menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI untuk periode [tanggal awal dan akhir periode pelaporan].

Panduan

Untuk menyatakan bahwa organisasi telah melaporkan sesuai dengan Standar GRI, organisasi harus telah mematuhi seluruh sembilan persyaratan pada bagian ini.

Organisasi diwajibkan untuk memasukkan nama organisasi dan tanggal awal dan tanggal akhir periode pelaporan mereka pada pernyataan, contohnya:

‘ABC Limited telah melaporkan sesuai dengan Standar GRI untuk periode dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.’

Organisasi diwajibkan untuk melaporkan apakah badan tata kelola tertinggi bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui informasi yang dilaporkan, termasuk topik material organisasi, berdasarkan [Pengungkapan 2-14 pada GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#).

Persyaratan 9: Memberi tahu GRI

- a. Organisasi harus memberi tahu GRI tentang penggunaan Standar GRI dan pernyataan penggunaan dengan mengirim surel ke reportregistration@globalreporting.org.

Panduan

Organisasi sebaiknya mencantumkan informasi berikut dalam surel:

- Nama resmi organisasi.
- Tautan ke indeks konten GRI.
- Tautan ke laporan, jika memublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri.
- Pernyataan penggunaan.
- Narahubung organisasi dan rincian kontak mereka.

Tidak ada biaya yang dikaitkan dengan pemberitahuan kepada GRI tentang penggunaan Standar GRI.

Pelaporan dengan merujuk pada Standar GRI

Organisasi dapat melaporkan dengan merujuk pada Standar GRI jika mereka tidak dapat mematuhi semua persyaratan untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI. Organisasi sebaiknya beralih ke pelaporan yang sesuai dengan Standar GRI seiring waktu karena hal ini akan menyediakan gambaran komprehensif tentang dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia.

Organisasi juga dapat melaporkan dengan merujuk pada Standar GRI jika mereka menggunakan Standar GRI tertentu, atau bagian dari konten Standar GRI, untuk melaporkan informasi tentang topik tertentu untuk tujuan tertentu, seperti mematuhi peraturan pelaporan tentang perubahan iklim.

Organisasi harus mematuhi ketiga persyaratan pada bagian ini untuk menyusun laporan dengan merujuk pada Standar GRI. Organisasi juga sebaiknya menerapkan prinsip pelaporan yang disebutkan pada [bagian 4 dari Standar ini](#) untuk memastikan pelaporan yang berkualitas tinggi. Selain itu, organisasi sebaiknya menjelaskan cara mereka mengelola dampak organisasi untuk topik yang dilaporkan dengan menggunakan [Pengungkapan 3-3 pada GRI 3: Topik Material 2021](#).

Ikhtisar persyaratan untuk pelaporan dengan merujuk pada Standar GRI

Memublikasikan indeks konten GRI
Menyediakan pernyataan penggunaan
Memberi tahu GRI

Memublikasikan indeks konten GRI

Organisasi harus:

- a. memublikasikan indeks konten GRI yang mencantumkan:
 - i. judul: indeks konten GRI;
 - ii. pernyataan penggunaan;
 - iii. judul GRI 1 yang digunakan;
 - iv. daftar pengungkapan yang dilaporkan dari Standar GRI, termasuk judul pengungkapan;
 - v. judul Standar GRI yang menjadi rujukan pengungkapan yang dilaporkan;
 - vi. [lokasi tempat informasi yang dilaporkan untuk setiap pengungkapan dapat ditemukan](#);
- b. jika organisasi memublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri dan indeks konten GRI tidak dicantumkan dalam laporan, sediakan tautan atau rujukan ke indeks konten GRI dalam laporan.

Panduan

Informasi yang dilaporkan menggunakan Standar GRI dapat dipublikasi atau diakses dalam berbagai format (contohnya, elektronik, berbasis kertas) di satu atau beberapa lokasi (contohnya, laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, halaman web, laporan tahunan). Indeks konten GRI menyediakan ikhtisar dari informasi yang dilaporkan organisasi, menunjukkan di mana informasi yang dilaporkan dapat ditemukan, dan membantu pengguna informasi mengakses informasi ini. Indeks konten juga menunjukkan Standar GRI dan pengungkapan mana yang telah digunakan oleh organisasi.

[Lampiran 2](#) dari Standar ini menyediakan panduan tentang cara mempersiapkan indeks konten GRI ketika melaporkan dengan merujuk pada Standar GRI. Panduan tersebut disertai contoh yang dapat digunakan organisasi untuk mempersiapkan indeks konten. Organisasi dapat menggunakan format berbeda untuk indeks konten selain format yang disediakan pada [Lampiran 2](#), selama format tersebut mematuhi persyaratan untuk indeks konten. Organisasi juga dapat menggunakan indeks konten yang ditentukan untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI dalam [Lampiran 1](#) dari Standar ini, jika sesuai. Dalam kasus tersebut, pernyataan penggunaan dalam [Lampiran 1](#), yang ditujukan untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI, harus diganti dengan pernyataan penggunaan untuk pelaporan dengan merujuk ke Standar GRI.

Menyediakan pernyataan penggunaan

- a. Organisasi harus menyertakan pernyataan berikut pada indeks konten GRI mereka:
[Nama organisasi] telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI ini untuk periode [tanggal awal dan akhir periode pelaporan] dengan merujuk kepada Standar GRI.

Panduan

Untuk menyatakan bahwa organisasi telah menyusun laporan dengan merujuk kepada Standar GRI, organisasi harus telah mematuhi tiga persyaratan dalam bagian ini.

Organisasi diwajibkan untuk memasukkan nama organisasi dan tanggal awal dan tanggal akhir periode pelaporan mereka dalam pernyataan, contohnya:

‘ABC Limited telah melaporkan informasi yang dikutip pada indeks konten GRI untuk periode dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 dengan merujuk kepada Standar GRI.’

Memberi tahu GRI

- a. Organisasi harus memberi tahu GRI tentang penggunaan Standar GRI dan pernyataan penggunaan dengan mengirim surel ke reportregistration@globalreporting.org.

Panduan

Organisasi sebaiknya mencantumkan informasi berikut di dalam surel:

- Nama resmi organisasi.
- Tautan ke indeks konten GRI.
- Tautan ke laporan, jika memublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri.
- Pernyataan penggunaan.
- Narahubung organisasi dan rincian kontak mereka.

Tidak ada biaya yang berkaitan dengan pemberitahuan kepada GRI tentang penggunaan Standar GRI.

4. Prinsip pelaporan

Prinsip pelaporan bersifat mendasar untuk mencapai pelaporan keberlanjutan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, organisasi diwajibkan untuk menerapkan prinsip pelaporan agar dapat mengklaim bahwa mereka telah mempersiapkan informasi yang dilaporkan sesuai dengan Standar GRI (lihat [bagian 3](#) dalam Standar ini).

Prinsip pelaporan memandu organisasi dalam memastikan kualitas dan penyajian yang tepat dari informasi yang dilaporkan. Informasi berkualitas tinggi memungkinkan pengguna informasi membuat penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi tentang dampak organisasi dan kontribusi mereka pada pembangunan berkelanjutan.

Setiap prinsip pelaporan terdiri dari persyaratan dan panduan tentang cara menerapkannya.

Ikhtisar prinsip

- Akurasi
- Keseimbangan
- Kejelasan
- Keterbandingan
- Kelengkapan
- Konteks keberlanjutan
- Ketepatan waktu
- Keterverifikasian

Akurasi

Persyaratan

- Organisasi harus melaporkan informasi yang benar dan cukup terperinci agar dapat dilakukan penilaian dampak organisasi.**

Panduan

Karakteristik yang menentukan akurasi bisa berbeda tergantung pada sifat informasi (kualitatif atau kuantitatif) dan tujuan penggunaan informasi. Akurasi informasi kuantitatif bergantung pada metode tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Akurasi informasi kualitatif bergantung pada tingkat perincian dan konsistensi dengan bukti yang tersedia. Pengguna informasi mensyaratkan perincian yang memadai untuk melakukan penilaian tentang dampak organisasi.

Untuk menerapkan prinsip Akurasi, organisasi sebaiknya:

- melaporkan informasi kualitatif yang konsisten dengan bukti yang tersedia dan informasi lain yang dilaporkan;
- menunjukkan data mana yang telah diukur;
- mendeskripsikan pengukuran data secara memadai dan dasar untuk penghitungannya, dan memastikan bahwa replikasi pengukuran dan penghitungan dengan hasil serupa dapat dilakukan;
- memastikan bahwa margin kesalahan untuk pengukuran data tidak memengaruhi kesimpulan atau penilaian pengguna informasi;
- menunjukkan data mana yang telah diperkirakan, dan menjelaskan asumsi mendasar dan teknik yang digunakan untuk perkiraan beserta setiap keterbatasan perkiraan tersebut.

Keseimbangan

Persyaratan

- a. **Organisasi harus melaporkan informasi dengan cara netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi.**

Panduan

Untuk menerapkan prinsip Keseimbangan, organisasi sebaiknya:

- menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan pengguna informasi dapat melihat tren negatif dan positif dampak dari tahun ke tahun;
- membedakan dengan jelas antara fakta dan penafsiran fakta oleh organisasi;
- tidak mengabaikan informasi relevan mengenai dampak negatif organisasi;
- tidak menekankan dampak atau berita positif secara berlebihan;
- tidak menyajikan informasi dengan cara yang tidak pantas yang dapat memengaruhi kesimpulan atau penilaian pengguna informasi.

Kejelasan

Persyaratan

- a. **Organisasi harus menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami.**

Panduan

Untuk menerapkan prinsip Kejelasan, organisasi sebaiknya:

- mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas tertentu dari pengguna informasi, yang berkaitan dengan kemampuan, bahasa, dan teknologi;
- menyajikan informasi dengan cara yang membuat pengguna dapat menemukan informasi yang mereka inginkan tanpa upaya yang berlebihan, contohnya, melalui daftar isi, peta, atau tautan;
- menyajikan informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang organisasi dan kegiatan mereka;
- menghindari singkatan, istilah teknis, atau jargon lain yang kemungkinan tidak diketahui oleh pengguna atau, jika hal ini digunakan, menyertakan penjelasan relevan di bagian yang tepat atau pada daftar istilah;
- melaporkan informasi dengan cara yang padat dan mengumpulkan informasi apabila bermanfaat tanpa mengabaikan rincian yang diperlukan;
- menggunakan grafik dan tabel data gabungan untuk membuat informasi dapat diakses dan dapat dipahami.

Keterbandingan

Persyaratan

- a. **Organisasi harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten agar mereka dapat melakukan analisis mengenai perubahan dalam dampak organisasi seiring waktu dan analisis dampak ini yang berkaitan dengan dampak organisasi lain.**

Panduan

Informasi yang dilaporkan dengan cara yang dapat dibandingkan memungkinkan organisasi dan pengguna informasi lain dapat mengakses dampak organisasi saat ini dibandingkan dengan dampak di masa lalu dan tujuan dan sasaran mereka. Informasi tersebut juga memungkinkan pihak eksternal untuk menilai dan mengukur dampak organisasi terhadap dampak organisasi lain sebagai bagian dari pemeringkatan kegiatan, keputusan investasi, dan program advokasi.

Untuk menerapkan prinsip Keterbandingan, organisasi sebaiknya:

- menyajikan informasi untuk periode pelaporan saat ini dan setidaknya dua periode sebelumnya, beserta setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- menggunakan metrik internasional yang diterima (contohnya, kilogram, liter), dan faktor dan protokol konversi standar, apabila berlaku, untuk menyusun dan melaporkan informasi;
- mempertahankan konsistensi dalam metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung data dan dalam menjelaskan metode dan asumsi yang digunakan;
- mempertahankan konsistensi dalam cara menyajikan informasi;
- melaporkan angka total atau data absolut (contohnya, ekuivalen ton metrik CO₂) beserta rasio atau data yang dinormalkan (contohnya, emisi CO₂ per unit yang dihasilkan) untuk memungkinkan perbandingan, dan menyediakan catatan penjelasan ketika menggunakan rasio;

- menyediakan informasi kontekstual (contohnya, ukuran organisasi, lokasi geografis) untuk membantu pengguna informasi memahami faktor yang berkontribusi pada perbedaan antara dampak organisasi tersebut dan dampak organisasi lain;
- menyajikan pengungkapan saat ini di samping penyajian kembali data historis agar dapat dilakukan perbandingan jika telah terjadi perubahan dari informasi yang dilaporkan sebelumnya. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam panjang periode pelaporan, dalam metodologi pengukuran, dalam definisi yang digunakan, atau dalam elemen lain dari pelaporan. Organisasi diwajibkan melaporkan penyajian kembali informasi berdasarkan [Pengungkapan 2-4 pada GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#);
- jika penyajian kembali data historis tidak disediakan, jelaskan perubahan yang terjadi untuk menyediakan informasi kontekstual untuk menafsirkan pengungkapan saat ini.

Kelengkapan

Persyaratan

- Organisasi harus menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan.**

Panduan

Untuk menerapkan prinsip Kelengkapan, organisasi sebaiknya:

- menyajikan kegiatan, peristiwa, dan dampak untuk periode pelaporan di mana ketiga hal tersebut terjadi. Hal ini termasuk melaporkan informasi tentang kegiatan yang memiliki dampak minimal dalam jangka pendek, tetapi dampak kumulatif yang cukup dapat diperkirakan menjadi tak terhindarkan atau tidak dapat dipulihkan dalam jangka panjang (contohnya, kegiatan yang menghasilkan polutan bioakumulatif atau persisten);
- tidak mengabaikan informasi yang diperlukan untuk memahami dampak organisasi.

Jika organisasi terdiri dari beberapa entitas (yaitu, entitas induk dan entitas anak perusahaan), organisasi tersebut diwajibkan untuk menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menggabungkan informasi berdasarkan [2-2-c dalam GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#).

Jika informasi untuk pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan di mana alasan tidak mencantumkan diizinkan tidak tersedia atau tidak lengkap, maka organisasi diwajibkan untuk menyediakan alasan tidak mencantumkan. Ketika informasi tidak lengkap, organisasi diwajibkan untuk menentukan bagian mana yang tidak ada (contohnya, tentukan entitas yang informasinya tidak ada). Lihat [Persyaratan 6](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut.

Konteks keberlanjutan

Persyaratan

- Organisasi harus melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan.**

Panduan

Pembangunan berkelanjutan telah didefinisikan sebagai 'pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka' [8]. Tujuan pelaporan keberlanjutan menggunakan Standar GRI adalah untuk menyediakan transparansi tentang cara organisasi berkontribusi atau bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Untuk tujuan ini, organisasi perlu menilai dan melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan.

Untuk menerapkan prinsip Keberlanjutan, organisasi sebaiknya:

- memanfaatkan informasi objektif dan tindakan otoritatif mengenai pembangunan berkelanjutan untuk melaporkan informasi tentang dampak-dampak organisasi (contohnya, penelitian ilmiah atau konsensus tentang batasan dan kebutuhan yang ada pada sumber daya lingkungan);
- melaporkan informasi tentang dampak organisasi yang terkait dengan tujuan dan kondisi pembangunan berkelanjutan (contohnya, melaporkan emisi gas rumah kaca [GHG] total beserta penurunan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dalam *Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim [FCCC] Perjanjian Paris* [4]);
- melaporkan informasi tentang dampak-dampak mereka terkait dengan ekspektasi masyarakat dan ekspektasi tata cara bisnis yang bertanggung jawab yang ditetapkan dalam instrumen resmi antarpemerintah yang

diharapkan dipatuhi oleh organisasi (contohnya, *Panduan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi [OECD] untuk Perusahaan Multinasional* [3], *Prinsip-Prinsip Penuntun tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB* [5]) dan dalam instrumen spesifik sektor, lokal, regional, atau global lainnya yang diakui;

- jika beroperasi di berbagai lokasi, melaporkan informasi tentang dampak organisasi terkait dengan konteks lokal yang sesuai (contohnya, melaporkan penggunaan total air, beserta penggunaan air terkait dengan ambang batas berkelanjutan dan konteks sosial daerah tangkapan air tertentu).

Memahami konteks keberlanjutan menyediakan informasi penting bagi organisasi untuk menentukan dan menyusun laporan tentang topik material mereka (lihat [GRI 3: Topik Material 2021](#)). Standar Sektor GRI mendeskripsikan konteks sektor dan dapat membantu organisasi memahami konteks keberlanjutan mereka.

Ketepatan Waktu

Persyaratan

- Organisasi harus melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan.**

Panduan

Kegunaan informasi erat kaitannya dengan apakah informasi itu tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi untuk memadukannya dalam pengambilan keputusan mereka. Dengan demikian, prinsip Ketepatan Waktu berarti seberapa rutin dan seberapa cepat setelah periode pelaporan informasi tersebut dipublikasikan.

Untuk menerapkan prinsip Ketepatan Waktu, organisasi sebaiknya:

- menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyediakan informasi dengan tepat waktu dan memastikan bahwa informasi tersebut berkualitas tinggi dan memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip pelaporan lainnya;
- memastikan konsistensi dalam panjang periode pelaporan;
- menunjukkan periode waktu yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan.

Lihat [bagian 5.1](#) dalam Standar ini untuk informasi tentang penyelarasan periode pelaporan dan jadwal publikasi pelaporan keberlanjutan dan jenis pelaporan lainnya.

Keterverifikasian

Persyaratan

- Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya.**

Panduan

Penting bahwa informasi yang dilaporkan dapat diteliti untuk menentukan kebenarannya dan untuk menentukan sejauh mana prinsip pelaporan telah diterapkan.

Untuk menerapkan prinsip Keterverifikasian, organisasi sebaiknya:

- mendirikan kendali internal dan mengelola dokumentasi dengan cara sedemikian rupa sehingga individu selain mereka yang mempersiapkan informasi yang dilaporkan (contohnya, auditor internal, penyedia penjaminan eksternal) dapat meninjaunya;
- mendokumentasikan proses pengambilan keputusan yang mendasari pelaporan keberlanjutan organisasi dengan cara yang memungkinkan dapat dilakukannya pemeriksaan keputusan dan proses utama, seperti proses dalam menentukan topik material;
- jika organisasi merancang sistem informasi untuk pelaporan keberlanjutan, rancanglah sistem ini dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diteliti sebagai bagian dari proses penjaminan eksternal;
- dapat mengidentifikasi sumber asli dari informasi yang dilaporkan dan menyediakan bukti yang terpercaya untuk mendukung asumsi atau perhitungan;
- dapat menyediakan gambaran dari sumber asli dari informasi yang dilaporkan yang menegaskan akurasi informasi dalam margin kesalahan yang dapat diterima;
- menghindari mencantumkan informasi yang tidak didukung oleh bukti kecuali informasi tersebut relevan untuk memahami dampak organisasi;
- menyediakan penjelasan yang jelas tentang setiap ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi yang

dilaporkan.

Lihat [bagian 5.2](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang peningkatan kredibilitas pelaporan keberlanjutan organisasi.

5. Rekomendasi tambahan untuk pelaporan

Bagian ini menyajikan rekomendasi untuk organisasi agar menyelaraskan pelaporan keberlanjutan dengan jenis pelaporan lainnya serta meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan.

5.1 Menyelaraskan pelaporan keberlanjutan dengan pelaporan lain

Organisasi sebaiknya menyelaraskan pelaporan keberlanjutan mereka dengan pelaporan lain yang diwajibkan undang-undang dan regulasi, khususnya pelaporan finansial. Hal ini berarti bahwa organisasi sebaiknya melaporkan informasi untuk periode pelaporan yang sama dan untuk kelompok entitas yang sama seperti yang dicakup dalam pelaporan finansial mereka. Organisasi juga sebaiknya memublikasikan informasi pada waktu yang sama dengan pelaporan finansial mereka, apabila ini memungkinkan.

5.2 Meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan

Ada beberapa cara agar organisasi dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan mereka. Ini mencakup penggunaan kendali internal, penjaminan eksternal, dan pemangku kepentingan atau panel ahli. Organisasi tidak diwajibkan untuk menerapkan metode ini ketika melaporkan sesuai dengan Standar GRI, tetapi disarankan untuk melakukannya.

Kendali internal

Organisasi sebaiknya mendirikan kendali internal untuk memperkuat integritas dan kredibilitas pelaporan keberlanjutan. Kendali internal adalah proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh organisasi, umumnya manajemen mereka, untuk menyediakan penjaminan yang wajar mengenai proses pencapaian tujuan mereka.

Kendali internal dapat diimplementasikan dalam operasional sehari-hari dan melalui fungsi kepatuhan. Organisasi juga dapat mendirikan dan mempertahankan fungsi audit internal sebagai bagian dari proses mereka untuk manajemen risiko untuk lebih meningkatkan kredibilitas pelaporan keberlanjutan mereka.

Dalam beberapa yurisdiksi, perundang-undangan tentang tata kelola perusahaan mewajibkan badan tata kelola tertinggi untuk menyelidiki dan, jika mereka yakin, menegaskan kecukupan kendali organisasi dalam laporan tahunan. Konfirmasi ini mungkin hanya berkaitan dengan kecukupan kendali internal untuk pelaporan finansial. Badan ini mungkin tidak menyediakan informasi tentang apakah kendali internal yang sama dapat juga menilai kredibilitas pelaporan keberlanjutan organisasi secara memadai. Jika organisasi mengandalkan kendali internal yang didirikan untuk pelaporan finansial, organisasi sebaiknya menilai relevansi kendali tersebut untuk pelaporan keberlanjutan mereka. Pada keadaan ketika kendali internal tidak memadai, organisasi sebaiknya mengidentifikasi dan menggunakan kendali internal tambahan untuk menilai kredibilitas pelaporan keberlanjutan mereka.

Penjaminan eksternal

Selain kendali internal, organisasi sebaiknya mencari penjaminan eksternal untuk pelaporan keberlanjutan mereka. [Pengungkapan 2-5 dalam GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#) mewajibkan organisasi untuk mendeskripsikan kebijakan dan praktik mereka untuk mencari penjaminan eksternal untuk pelaporan keberlanjutan mereka. Jika pelaporan keberlanjutan telah dijamin secara eksternal, organisasi juga diwajibkan untuk mendeskripsikan apa yang dijamin dan atas dasar apa.

Penjaminan eksternal terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia penjaminan untuk menilai kualitas dan kredibilitas informasi kualitatif dan kuantitatif yang dilaporkan oleh organisasi. Penjaminan eksternal juga dapat digunakan untuk menilai sistem atau proses organisasi untuk mempersiapkan informasi (contohnya, proses dalam menentukan topik material). Penjaminan eksternal berbeda dengan kegiatan yang dirancang untuk menilai atau memvalidasi kinerja, seperti penilaian kepatuhan atau penerbitan sertifikasi kinerja.

Penjaminan eksternal menghasilkan laporan penjaminan yang dipublikasikan atau kesimpulan yang dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa informasi telah dipersiapkan sesuai dengan standar pelaporan. Jaminan tersebut juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko dalam kualitas data dan meningkatkan kepercayaan atas informasi yang dilaporkan. Selanjutnya, hal ini membantu pengguna informasi dan organisasi dalam mengandalkan

informasi yang dilaporkan untuk pengambilan keputusan mereka.

Penjaminan eksternal sebaiknya dilaksanakan oleh penyedia penjaminan yang kompeten dengan pengalaman dan kualifikasi yang sesuai. Penyedia penjaminan sebaiknya:

- terpisah dari organisasi dan karena itu dapat mencapai kesimpulan yang imparial dan objektif tentang pelaporan organisasi dan dapat memublikasikan kesimpulan ini dalam laporan yang tersedia untuk umum;
- terbukti kompeten dalam pokok bahasan dan praktik penjaminan;
- kompeten dalam menerapkan prosedur pengendalian mutu untuk keterlibatan penjaminan;
- dapat melaksanakan keterlibatan dengan cara yang sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan ditandai dengan prosedur yang didefinisikan yang selaras dengan standar profesional untuk penjaminan;
- dapat mempertimbangkan pemilihan informasi yang dilaporkan beserta akurasinya, dan untuk menilai apakah pelaporan tersebut menyediakan gambaran komprehensif tentang dampak organisasi yang paling signifikan dan cara mereka mengelola dampak ini;
- dapat menilai sejauh mana organisasi telah menerapkan Standar GRI dalam merumuskan pendapat atau mencapai kesimpulan.

Panel pemangku kepentingan atau ahli

Organisasi juga dapat menyelenggarakan panel pemangku kepentingan atau ahli untuk mencari pandangan tentang pendekatan mereka terhadap pelaporan keberlanjutan atau untuk meminta nasihat tentang informasi yang akan dilaporkan.

Daftar Istilah

Daftar Istilah ini memberikan definisi untuk istilah yang digunakan dalam Standar ini. Organisasi diwajibkan untuk menerapkan definisi-definisi ini saat menggunakan Standar GRI.

Definisi-definisi yang dicakup di dalam daftar istilah ini mengandung istilah-istilah yang diperjelas lebih lanjut dalam [Daftar Istilah Standar GRI](#) lengkap. Semua istilah yang didefinisikan ditulis dengan garis bawah. Jika ada istilah yang tidak didefinisikan dalam Daftar Istilah ini atau dalam *Daftar Istilah Standar GRI* yang lengkap, maka berlaku definisi yang secara umum digunakan dan dimengerti.

-
- A** **anak**
orang yang berusia di bawah 15 tahun, atau di bawah usia selesai wajib belajar, tergantung mana yang lebih tinggi
- Catatan 1: Pengecualian dapat dilakukan di negara-negara tertentu dengan fasilitas pendidikan dan perekonomian yang tidak berkembang secara mencukupi dan usia minimal 14 tahun diberlakukan. Negara-negara yang dikecualikan ini disebutkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam tanggapan terhadap penerapan khusus oleh negara-negara bersangkutan dan dengan berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pemberi kerja dan pekerja.
- Catatan 2: *Konvensi Usia Minimum* ILO, 1973, (No.138), mengacu pada buruh anak dan pekerja muda.
-
- B** **badan tata kelola**
kelompok individu resmi yang bertanggung jawab atas panduan strategis organisasi, pemantauan manajemen yang efektif, dan akuntabilitas manajemen terhadap organisasi yang lebih luas dan pemangku kepentingannya
- badan tata kelola tertinggi**
badan tata kelola dengan otoritas tertinggi dalam organisasi
- Catatan: Di beberapa yurisdiksi, sistem tata kelola terdiri dari dua tingkat, di mana pengawasan dan pengelolaan dipisahkan atau ketika hukum lokal menyediakan dewan pengawas yang diambil dari noneksekutif untuk memantau dewan pengelolaan eksekutif. Dalam kasus seperti itu, kedua tingkatan tersebut termasuk dalam definisi badan tata kelola tertinggi.
-
- D** **dampak**
efek yang dimiliki atau dapat dimiliki organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk pada hak asasi manusia mereka, yang pada gilirannya dapat menunjukkan kontribusinya (negatif atau positif) terhadap pembangunan berkelanjutan
- Catatan 1: Dampak dapat bersifat aktual atau potensial, negatif atau positif, jangka pendek atau jangka panjang, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat dipulihkan atau tidak dapat dipulihkan.
- Catatan 2: Lihat bagian [2.1 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'dampak'.
-
- H** **hak asasi manusia**
hak yang melekat pada semua manusia, yang mencakup, setidaknya, semua hak yang diatur dalam *Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang ditetapkan dalam *Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja*
- Sumber: United Nations (UN), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, 2011; diubah
- Catatan: Lihat [Panduan untuk 2-23-b-i dalam GRI 2: Pengungkapan Umum 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'hak asasi manusia'.

hubungan bisnis organisasi

hubungan yang dimiliki organisasi dengan mitra bisnis, dengan entitas di dalam rantai nilainya termasuk yang berada di luar tingkat pertama, dan dengan entitas lain yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanannya

Sumber: United Nations (UN), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, 2011; diubah

Catatan: Contoh entitas lain yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan organisasi adalah organisasi nonpemerintah yang dengannya organisasi tersebut memberikan dukungan kepada masyarakat lokal atau pasukan keamanan negara bagian yang melindungi fasilitas organisasi.

K**karyawan**

individu yang berada dalam hubungan kepegawaian dengan organisasi, berdasarkan hukum atau penerapan nasional

kelompok rentan

sekelompok individu dengan kondisi atau karakteristik tertentu (misalnya, ekonomi, fisik, politik, sosial) yang dapat mengalami dampak negatif sebagai hasil dari kegiatan organisasi dengan lebih parah daripada populasi umum

Contoh: anak-anak dan pemuda; lansia; mantan gerilyawan; keluarga yang terpengaruh HIV/AIDS; pembela hak asasi manusia; masyarakat adat; pengungsi dalam negeri; pekerja migran dan keluarga mereka; minoritas nasional atau etnis, agama dan bahasa; orang-orang yang mungkin didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau karakteristik seks mereka (misalnya, lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks); penyandang disabilitas; pengungsi atau pengungsi yang kembali; perempuan

Catatan: Kerentanan dan dampak dapat berbeda bergantung pada jenis kelamin.

keparahan (dari suatu dampak)

Tingkat keparahan dampak negatif aktual atau potensial ditentukan oleh skalanya (yaitu, seberapa parah dampaknya), ruang lingkup (yaitu, seberapa luas dampaknya), dan karakter yang tidak dapat diperbaiki (seberapa sulit kerugian yang diakibatkannya untuk dapat dilawan atau diperbaiki).

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 2018; diubah
United Nations (UN), *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012; diubah

Catatan: Lihat [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'keparahan'.

komunitas lokal

individu atau kelompok individu yang tinggal atau bekerja di area yang terpengaruh atau yang dapat terpengaruh oleh aktivitas organisasi

Catatan: Masyarakat lokal dapat beragam, mulai dari orang yang tinggal di dekat operasi organisasi, hingga mereka yang tinggal jauh.

M**masyarakat adat**

masyarakat adat pada umumnya diidentifikasi sebagai:

- masyarakat suku di negara merdeka yang keadaan sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat nasional lainnya, dan yang statusnya diatur secara penuh atau sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus;
- masyarakat di negara merdeka yang dipandang sebagai pribumi karena mereka merupakan keturunan dari populasi yang telah menghuni negara tersebut, atau sebuah wilayah geografis milik negara tersebut, pada masa penaklukan atau kolonisasi atau penetapan batasan negara saat ini dan mereka yang, terlepas dari status hukum mereka,

mempertahankan seluruh atau beberapa dari institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka.

Sumber: International Labour Organization (ILO), *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169)

mitigasi

tindakan yang diambil untuk mengurangi tingkat dampak negatif

Sumber: United Nations (UN), *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012; diubah

Catatan: Mitigasi dampak negatif aktual mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengurangi keparahan dari dampak negatif yang telah terjadi, dengan sisa dampak yang memerlukan remediasi. Mitigasi potensi dampak negatif mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak negatif.

mitra bisnis

entitas di mana organisasi memiliki beberapa bentuk keterlibatan langsung dan formal dengan tujuan memenuhi tujuan bisnisnya

Sumber: Shift and Mazars LLP, *UN Guiding Principles Reporting Framework*, 2015; diubah

Contoh: afiliasi, pelanggan bisnis ke bisnis, klien, pemasok tingkat pertama, pemegang waralaba, mitra usaha bersama, perusahaan investasi di mana organisasi memiliki posisi kepemilikan saham

Catatan: Mitra bisnis tidak mencakup anak perusahaan dan afiliasi yang dikendalikan oleh organisasi.

P

pekerja

orang yang melaksanakan pekerjaan untuk organisasi

Contoh: karyawan, pekerja agensi, pekerja murid, kontraktor, pekerja rumahan, pekerja magang, wiraswasta, subkontraktor, sukarelawan, dan orang yang bekerja untuk organisasi selain organisasi pelapor, seperti untuk pemasok

Catatan: Dalam Standar GRI, dalam sejumlah kasus dijelaskan apakah subset khusus dari pekerja akan disyaratkan untuk digunakan.

pemangku kepentingan

individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang terpengaruh atau dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 2018; diubah

Contoh: mitra bisnis, organisasi masyarakat sipil, konsumen, pelanggan, karyawan dan pekerja lain, pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nonpemerintah, pemegang saham dan investor lainnya, pemasok, serikat dagang, kelompok rentan

Catatan: Lihat bagian 2.4 dalam *GRI 1: Landasan 2021* untuk informasi lebih lanjut tentang 'pemangku kepentingan'.

pemasok

entitas hulu dari organisasi (yaitu, dalam rantai pasokan organisasi), yang menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam pengembangan produk atau layanan organisasi itu sendiri

Contoh: pialang, konsultan, kontraktor, distributor, pemegang waralaba, pekerja rumah, kontraktor mandiri, pemegang lisensi, produsen, produsen utama, subkontraktor, pedagang grosir

Catatan: Pemasok dapat memiliki hubungan bisnis langsung dengan organisasi (sering disebut sebagai pemasok tingkat pertama) atau hubungan bisnis tidak langsung.

pembangunan berkelanjutan/keberlanjutan

pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Sumber: World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987

Catatan: Istilah 'keberlanjutan' dan 'pembangunan berkelanjutan' digunakan secara bergantian dalam Standar GRI.

pemulihan/remediasi

sarana untuk melawan atau memperbaiki dampak negatif atau pemberian ganti rugi

Sumber: United Nations (UN), *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012; diubah

Contoh: permintaan maaf, kompensasi finansial atau nonfinansial, pencegahan kerusakan melalui perintah atau jaminan tidak akan terulang, sanksi hukuman (baik pidana atau administratif, seperti denda), restitusi, restorasi, rehabilitasi

periode pelaporan

periode waktu spesifik yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan.

Contoh: tahun fiskal, tahun kalender

R**rantai nilai**

beragam aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, dan oleh entitas hulu dan entitas hilir dari organisasi, untuk menghadirkan produk atau layanan organisasi mulai dari konsepsi hingga penggunaan akhir.

Catatan 1: Entitas hulu dari organisasi (misal, pemasok) menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam mengembangkan produk atau layanan organisasi. Entitas hilir dari organisasi (misal, distributor, pelanggan) menerima produk atau layanan dari organisasi.

Catatan 2: Rantai nilai mencakup rantai pasokan.

rantai pasokan

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh entitas hulu dari organisasi, yang menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam pengembangan produk atau layanan organisasi itu sendiri

T**topik material**

topik yang mencerminkan dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia mereka

Catatan: Lihat [bagian 2.2 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) dan [bagian 1 dalam GRI 3: Topik Material 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'topik material'.

U**uji tuntas**

proses untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memberikan penjelasan bagaimana sebuah organisasi menangani dampak negatifnya yang aktual dan potensial

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011; diubah
United Nations (UN), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, 2011; diubah

Catatan: Lihat [bagian 2.3 dalam GRI 1: Landasan 2021](#) untuk informasi lebih lanjut tentang 'uji tuntas'.

Daftar Pustaka

Bagian ini mendaftarkan instrumen resmi antarpemerintah yang digunakan dalam mengembangkan Standar ini.

Instrumen resmi:

1. Organisasi Buruh Internasional (ILO), *'Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial*, 2017.
2. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), *Panduan Uji Tuntas OECD untuk Tata Cara Bisnis yang Bertanggung Jawab*, 2018.
3. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), *Panduan OECD bagi Perusahaan Multinasional*, 2011.
4. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim (FCCC)Perjanjian Paris*, 2015.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Pelaksanaan Kerangka Kerja PBB "Melindungi, Menghormati dan Memulihkan"*, 2011.
6. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, 2008.
7. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang Isu Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya*, John Ruggie, 2011.
8. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED), *Masa Depan Kita Bersama*, 1987.

Lampiran 1. Indeks konten GRI yang sesuai

Indeks konten GRI

Pernyataan penggunaan	[Nama organisasi] telah melaporkan sesuai dengan Standar GRI untuk periode <u>[tanggal awal dan tanggal akhir periode pelaporan]</u>
GRI 1 yang digunakan	GRI 1: Landasan 2021
Standar Sektor GRI yang berlaku	[Judul Standar Sektor GRI yang berlaku]

STANDAR GRI/SUMBER LAIN	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
Pengungkapan umum						
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1 Rincian organisatoris		Sel berwarna abu-abu menunjukkan sesuatu yang tidak berlaku. Hal ini hanya berkaitan dengan kolom 'Yang Tidak Dicantumkan' dan 'No. rujukan Standar Sektor GRI'.			
	2-2 Entitas yang dicantumkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi					
	2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan					
	2-4 Penyajian kembali informasi					
	2-5 Penjaminan eksternal					
	2-6 Kegiatan, rantai nilai dan hubungan bisnis lain					
	" "	" "	" "	" "	" "	
	2-30 Perjanjian perundingan kolektif					
Topik material						
GRI 3: Topik Material 2021	3-1 Proses untuk menentukan topik material					
	3-2 Daftar topik material					
[Topik material]						
GRI 3: Topik Material 2021	3-3 Manajemen topik material					
[Judul sumber]	[Judul pengungkapan]					
" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
[Topik material]						
GRI 3: Topik Material 2021	3-3 Manajemen topik material					
[Judul sumber]	[Judul pengungkapan]					
" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
Topik dalam Standar Sektor GRI yang berlaku yang ditentukan sebagai bukan material						
TOPIK			PENJELASAN			
[Judul Standar Sektor GRI]						
[Topik]			[Penjelasan]			
[Topik]			[Penjelasan]			

Panduan

Lampiran ini menyediakan panduan tentang cara mempersiapkan indeks konten GRI ketika menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI. Panduan tersebut disertai contoh yang dapat digunakan organisasi untuk mempersiapkan indeks konten. Organisasi dapat menggunakan format berbeda untuk indeks konten selain format yang disediakan di sini, selama format tersebut mematuhi persyaratan untuk indeks konten yang ditentukan dalam [Persyaratan 7](#) dalam Standar ini.

Organisasi dapat mencantumkan informasi tambahan dalam indeks konten, selain apa yang diwajibkan oleh Standar GRI. Contohnya, organisasi dapat menunjukkan bagaimana pengungkapan yang telah mereka laporkan menggunakan Standar GRI berkaitan dengan pengungkapan yang diwajibkan oleh standar pelaporan atau kerangka kerja lainnya.

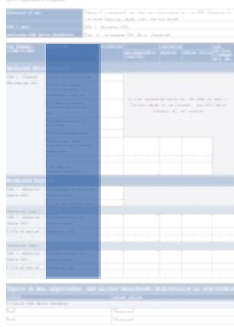
Organisasi sebaiknya memastikan bahwa penambahan tersebut tidak mengganggu keterbacaan indeks konten. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan setiap informasi tambahan dalam kolom atau baris terpisah yang dicantumkan pada bagian akhir indeks konten, setelah semua informasi yang diwajibkan telah ditentukan.

Organisasi sebaiknya tidak melaporkan informasi yang diwajibkan oleh pengungkapan secara langsung dalam indeks konten. Pengecualian dapat dibuat jika informasi tersebut ringkas dan lebih mudah ditemukan dalam indeks konten dibandingkan di lokasi lain (contohnya, informasi pada periode pelaporan mungkin lebih mudah ditemukan ketika dinyatakan secara langsung dalam indeks konten); atau untuk melaporkan bahwa suatu pokok perihal (contohnya, Komite, kebijakan, praktik, proses) yang disebutkan pada suatu pengungkapan tidak ada. Pelaporan terperinci dalam indeks konten sebaiknya dihindari.

	Pernyataan penggunaan Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan pernyataan penggunaan untuk pelaporan dalam indeks konten GRI sesuai dengan Standar GRI, seperti yang ditentukan dalam Persyaratan 7-a-ii dalam Standar ini. Lihat Persyaratan 8 dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang pernyataan penggunaan. GRI 1 yang digunakan Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul GRI 1 yang telah mereka gunakan dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan dalam Persyaratan 7-a-iii dalam Standar ini. Judul GRI 1 mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi (contohnya, <i>GRI 1: Landasan 2021</i>). GRI 1 tidak berisi pengungkapan, tetapi menentukan persyaratan untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI. Standar GRI diperbarui secara rutin, dan versi GRI 1 yang lebih baru dapat memiliki persyaratan yang berbeda untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI dibandingkan dengan versi sebelumnya. Menunjukkan versi GRI 1 mana yang telah digunakan organisasi membantu untuk menunjukkan persyaratan mana yang harus mereka patuhi. Standar Sektor GRI yang berlaku Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul Standar Sektor GRI yang berlaku pada sektornya dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan dalam Persyaratan 7-a-iv dalam Standar ini. Judul Standar Sektor GRI mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi (contohnya, <i>GRI 11: Sektor Minyak dan Gas 2021</i>).
	Judul Standar GRI dan sumber lain dari pengungkapan yang dilaporkan Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul Standar Universal GRI, Standar Sektor GRI, dan Standar Topik GRI yang telah mereka gunakan untuk melaporkan pengungkapan, seperti yang ditentukan oleh Persyaratan 7-a-viii dalam Standar ini. Ini mencakup: • <i>GRI 2: Pengungkapan Umum 2021</i>; • <i>GRI 3: Topik Material 2021</i>; • Standar Topik yang telah digunakan organisasi untuk pelaporan tentang topik material mereka; • Standar Sektor yang telah digunakan organisasi untuk melaporkan pengungkapan sektor tambahan yang terdaftar untuk <u>topik material mereka</u>. Judul Standar GRI mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi (contohnya, <i>GRI 303: Air dan Efluen 2018</i>).

Tahun publikasi menunjukkan versi Standar GRI yang telah digunakan oleh organisasi. Standar GRI diperbarui secara rutin, dan versi Standar GRI yang lebih baru dapat memiliki pengungkapan yang berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tahun publikasi Standar GRI tidak merujuk pada periode pelaporan yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan atau tahun saat informasi yang dilaporkan tersebut dipublikasikan.

Jika organisasi melaporkan pengungkapan dari sumber lain, organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul sumber yang telah digunakan dalam indeks konten.



Pengungkapan

Organisasi diwajibkan untuk mendaftarkan semua pengungkapan yang telah dilaporkan dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan dalam [Persyaratan 7-a-vii](#) dalam Standar ini. Ini mencakup pengungkapan dari *GRI 2: Pengungkapan Umum 2021* dan *GRI 3: Topik Material 2021*, dan pengungkapan yang telah mereka laporkan untuk setiap topik material.

Untuk setiap topik material, organisasi diwajibkan untuk mendaftarkan pengungkapan yang telah mereka laporkan dari Standar Topik GRI dan Standar Sektor GRI, beserta pengungkapan yang telah mereka laporkan dari sumber lain. Organisasi sebaiknya mengelola pengungkapan ini berdasarkan setiap topik material. Lihat [Persyaratan 5-a](#) dan [Persyaratan 5-b-i](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang pelaporan pengungkapan untuk setiap topik material.

Selain pengungkapan dari Standar Topik, Standar Sektor dapat mencantumkan pengungkapan sektor tambahan untuk dilaporkan oleh organisasi. Melaporkan pengungkapan sektor tambahan ini adalah rekomendasi. Jika organisasi melaporkan salah satu dari pengungkapan sektor tambahan ini untuk topik material, mereka diwajibkan untuk mendaftarkan pengungkapan tersebut dalam indeks konten.

Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul pengungkapan dalam indeks konten. Judul pengungkapan mencantumkan nomor dan nama (contohnya, 2-6 Kegiatan, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya).

Untuk pengungkapan dari sumber lain, jika judul pengungkapan tidak tersedia, organisasi dapat mencantumkan setiap informasi lain yang membantu mengidentifikasi pengungkapan tersebut.

Pengungkapan Standar Topik GRI yang terdaftar dalam Standar Sektor GRI yang berlaku yang tidak dilaporkan

Untuk setiap topik dalam Standar Sektor GRI yang berlaku yang ditentukan sebagai material, organisasi diwajibkan untuk mencantumkan dalam indeks konten GRI setiap pengungkapan Standar Topik GRI yang terdaftar untuk topik tersebut yang tidak dilaporkan oleh organisasi, seperti yang ditentukan dalam [Persyaratan 7-a-ix](#) dalam Standar ini.

Mungkin terdapat kasus di mana pengungkapan Standar Topik yang terdaftar dalam Standar Sektor tidak relevan dengan dampak organisasi yang terkait dengan topik material. Dalam kasus tersebut, organisasi diwajibkan untuk menyatakan alasan tidak mencantumkan 'tidak berlaku', dan untuk menjelaskan secara singkat mengapa pengungkapan tersebut tidak relevan. Lihat [Persyaratan 5-b](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang pelaporan topik material yang dicakup dalam Standar Sektor ini.



Lokasi

Untuk setiap pengungkapan yang telah dilaporkan, organisasi diwajibkan untuk mencantumkan lokasi dalam indeks konten GRI (yaitu, nomor halaman atau tautan tertentu), contohnya, dalam laporan, dokumen, situs web tempat informasi tersebut dapat ditemukan, seperti yang ditentukan dalam [Persyaratan 7-a-xi](#) dalam Standar ini. Jika informasi yang dilaporkan untuk suatu pengungkapan tersebar di beberapa halaman atau halaman web, organisasi diwajibkan untuk menentukan semua nomor halaman dan tautan tempat tersebarnya informasi tersebut.

Jika organisasi diwajibkan untuk melaporkan informasi yang sebelumnya telah dilaporkan, dan informasi tersebut belum berubah selama periode pelaporan (contohnya, organisasi diwajibkan untuk melaporkan informasi tentang kebijakan atau proses yang belum berubah sejak periode pelaporan sebelumnya), organisasi dapat memublikasikan kembali informasi tersebut atau menyediakan rujukan ke informasi yang dilaporkan sebelumnya dalam indeks konten.



Yang Tidak Dicantumkan

Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan alasan tidak mencantumkan yang telah mereka gunakan untuk setiap pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan dalam [Persyaratan 7-a-xii](#) dalam Standar ini.

Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan yang alasan tidak mencantumkan diizinkan, organisasi diwajibkan untuk menentukan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten. Organisasi juga diwajibkan untuk menyediakan salah satu dari alasan tidak mencantumkan yang diizinkan dan penjelasan yang diwajibkan untuk alasan tersebut. Keempat alasan tidak mencantumkan yang diizinkan adalah: tidak berlaku, batasan hukum, kendala kerahasiaan, dan informasi tidak tersedia/tidak lengkap. Lihat [Persyaratan 6](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang alasan tidak mencantumkan.



Nomor rujukan Standar Sektor GRI

Ketika mendaftarkan pengungkapan GRI dan pengungkapan sektor tambahan dari Standar Sektor GRI yang berlaku dalam indeks konten GRI, organisasi diwajibkan untuk mencantumkan nomor rujukan Standar Sektor GRI, seperti yang ditentukan dalam [Persyaratan 7-a-x](#) dalam Standar ini. Nomor rujukan Standar Sektor GRI merujuk pada pengidentifikasi unik untuk setiap judul pengungkapan yang terdaftar dalam Standar Sektor (contohnya, S11.1.1). Pengidentifikasi ini membantu pengguna informasi menilai pengungkapan mana yang terdaftar dalam Standar Sektor yang dicantumkan dalam pelaporan organisasi.



Topik material

Organisasi diwajibkan untuk mendaftarkan topik material dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan dalam [Persyaratan 7-a-v](#) dalam Standar ini.

Daftar topik material yang dicantumkan dalam indeks konten sama dengan daftar topik material yang dilaporkan berdasarkan [3-2-a dalam GRI 3: Topik Material 2021](#).



The image is a screenshot of a GRI content index table. It has multiple columns, including 'Topic', 'Materiality', and 'GRI Standard'. The table lists various topics such as 'Climate Change', 'Energy', 'Pollution', 'Waste', 'Water', 'Human Resources', 'Community Relations', and 'Product Safety'. Each topic has a corresponding 'Materiality' status, which can be 'Material', 'Not Material', or 'Not Disclosed'. The table is organized into sections, with some topics grouped together. The header row is highlighted in blue.

Topik dalam Standar Sektor GRI yang berlaku yang ditentukan sebagai bukan material

Organisasi diwajibkan untuk mendaftarkan dalam indeks konten GRI, setiap topik dari Standar Sektor GRI yang berlaku yang telah ditentukan oleh organisasi sebagai bukan material dan menjelaskan mengapa topik tersebut bukan material, seperti yang ditentukan dalam [Persyaratan 7-a-vi](#) dalam Standar ini. Lihat [Persyaratan 3-b](#) dalam Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan Standar Sektor untuk menentukan topik material.

Lampiran 2. Indeks konten GRI dengan rujukan

Indeks konten GRI

Pernyataan penggunaan	[Nama organisasi] telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI untuk periode [tanggal awal dan tanggal akhir <u>periode pelaporan</u>] dengan merujuk kepada Standar GRI.
GRI 1 yang digunakan	GRI 1: Landasan 2021

STANDAR GRI	PENGUNGKAPAN	LOKASI
[Judul Standar GRI]	[Judul pengungkapan]	
[Judul Standar GRI]	[Judul pengungkapan]	

Panduan

Lampiran ini menyediakan panduan tentang cara mempersiapkan indeks konten GRI ketika melaporkan dengan merujuk kepada Standar GRI. Panduan tersebut disertai contoh yang dapat digunakan organisasi untuk mempersiapkan indeks konten. Organisasi dapat menggunakan format berbeda untuk indeks konten selain format yang disediakan di sini, selama format tersebut mematuhi persyaratan untuk indeks konten yang ditentukan pada 'Pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI' pada akhir bagian 3 dari Standar ini. Organisasi juga dapat menggunakan indeks konten yang ditentukan untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI dalam [Lampiran 1](#), jika sesuai. Pada situasi tersebut, pernyataan penggunaan dalam Lampiran 1, yang ditujukan untuk pelaporan sesuai dengan Standar GRI, harus diganti dengan pernyataan penggunaan untuk pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI.

Organisasi dapat mencantumkan informasi tambahan dalam indeks konten, selain apa yang diwajibkan oleh Standar GRI. Contohnya, organisasi dapat menunjukkan bagaimana pengungkapan yang telah mereka laporkan menggunakan Standar GRI berkaitan dengan pengungkapan yang diwajibkan oleh standar pelaporan atau kerangka kerja lainnya.

Organisasi sebaiknya memastikan bahwa penambahan tersebut tidak mengganggu keterbacaan indeks konten. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan setiap informasi tambahan pada kolom atau baris terpisah yang disertakan pada bagian akhir indeks konten, setelah semua informasi yang diwajibkan telah disebutkan.

Organisasi sebaiknya tidak melaporkan informasi yang diwajibkan oleh pengungkapan secara langsung pada indeks konten. Pengecualian dapat dibuat jika informasi tersebut ringkas dan lebih mudah ditemukan pada indeks konten dibandingkan di lokasi lain (contohnya, informasi pada periode pelaporan mungkin lebih mudah ditemukan ketika dinyatakan secara langsung dalam indeks konten). Pelaporan terperinci dalam indeks konten sebaiknya dihindari.

	Pernyataan penggunaan Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan pernyataan penggunaan dalam indeks konten GRI untuk pelaporan dengan merujuk ke Standar GRI, seperti yang ditentukan dalam Persyaratan a-ii dalam 'Pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI' pada akhir bagian 3 dari Standar ini. Lihat persyaratan untuk menyediakan pernyataan penggunaan dalam 'Pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI' pada akhir bagian 3 dari Standar ini untuk informasi lebih lanjut tentang pernyataan penggunaan. GRI 1 yang digunakan Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul GRI 1 yang telah mereka gunakan dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan dalam Persyaratan a-iii pada 'Pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI' pada akhir bagian 3 dari Standar ini. Judul GRI mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi (contohnya, <i>GRI 1: Landasan 2021</i>). GRI 1 tidak berisi pengungkapan, tetapi menentukan persyaratan untuk pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI. Standar GRI diperbarui secara rutin, dan versi GRI 1 yang lebih baru dapat memiliki persyaratan yang berbeda untuk pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI dibandingkan dengan versi sebelumnya. Menunjukkan versi GRI 1 mana yang telah digunakan organisasi membantu mengklarifikasi persyaratan mana yang harus mereka patuhi.
	Judul Standar GRI dari pengungkapan yang dilaporkan Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul semua Standar GRI yang telah mereka gunakan untuk melaporkan pengungkapan dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan pada Persyaratan a-v pada 'Pelaporan dengan merujuk kepada Standar GRI' pada akhir bagian 3 dari Standar ini. Ini dapat mencakup <i>GRI 2: Pengungkapan Umum 2021</i>, <i>GRI 3: Topik Material 2021</i>, Standar Sektor GRI, dan Standar Topik GRI. Judul Standar GRI mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi (contohnya, <i>GRI 303: Air dan Efluen 2018</i>). Tahun publikasi menunjukkan versi Standar GRI yang telah digunakan oleh organisasi. Standar GRI diperbarui secara rutin, dan versi Standar GRI yang lebih baru dapat memiliki pengungkapan yang berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tahun publikasi Standar GRI tidak merujuk pada <u>periode pelaporan</u> yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan atau tahun saat informasi yang dilaporkan tersebut dipublikasikan.
	Pengungkapan Organisasi diwajibkan untuk mendaftarkan semua pengungkapan yang telah dilaporkan dari Standar GRI dalam indeks konten GRI, seperti yang ditentukan dalam Persyaratan a-iv dalam 'Pelaporan dengan merujuk ke Standar GRI' pada akhir bagian 3 dari Standar ini. Organisasi diwajibkan untuk mencantumkan judul pengungkapan dalam indeks konten. Judul pengungkapan mencantumkan nomor dan nama (contohnya, 303-3 Penarikan air).
	Lokasi Untuk setiap pengungkapan yang telah dilaporkan, organisasi diwajibkan untuk mencantumkan lokasi dalam indeks konten GRI (yaitu, nomor halaman atau tautan tertentu), contohnya, dalam laporan, dokumen, situs web tempat informasi tersebut dapat ditemukan, seperti yang ditentukan dalam Persyaratan a-vi dalam 'Pelaporan dengan merujuk ke Standar GRI' pada akhir bagian 3 dari Standar ini. Jika informasi yang dilaporkan untuk suatu pengungkapan tersebar di beberapa halaman atau halaman web, organisasi diwajibkan untuk menentukan semua nomor halaman dan tautan tempat tersebarnya informasi tersebut.

Pengakuan

Catatan Pemberitahuan

Terjemahan Bahasa Indonesia ini dilakukan oleh Language Scientific, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, melalui peninjauan sejawat oleh para individu di bawah ini:

- **Hendri Yulius Wijaya**, Country Manager, GRI Indonesia
- **Dinah Madiadipura**, Founder and Chief of Content, Indonesia Labour Database
- **Monika Handayani**, Lecturer, Polytechnic State of Banjarmasin

Proses penerjemahan ini didukung oleh:



GRI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Swedia atas dukungan finansial yang diberikan untuk terjemahan Bahasa Indonesia dari GRI Standards terbaru 2021.

Catatan Penting

Terjemahan Bahasa Indonesia dari GRI Standards terbaru 2021 dibiayai oleh Pemerintah Swedia. Tanggung jawab terkait konten ditanggung oleh sang pembuat. Pemerintah Swedia tidak senantiasa memiliki pandangan dan interpretasi yang sama.

Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI dikembangkan dan disajikan dalam Bahasa Inggris. Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan untuk memastikan akurasi terjemahan, GRI Standards versi Bahasa Inggris tetap menjadi rujukan utama, bila ada pertanyaan atau perbedaan interpretasi yang muncul dari terjemahan.

Versi terbaru dari GRI Standards dalam Bahasa Inggris atau segala perbaruan terhadap versi Bahasa Inggris dipublikasikan dalam website GRI (www.globalreporting.org).



PO Box 10039,
1001 EA Amsterdam,
The Netherlands

www.globalreporting.org